

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERBATASAN NEGARA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(STUDI DI DESA LONG NAWANG KECAMATAN KAYAN  
HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA)**



**OLEH :**

**Anye Ckristofer**

**NPM : 1863201048**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM  
S A M A R I N D A**

**2025**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERBATASAN NEGARA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(STUDI DI DESA LONG NAWANG KECAMATAN KAYAN  
HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA)**



**OLEH :**

**Anye Ckristofer**  
**NPM : 1863201048**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM  
S A M A R I N D A**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

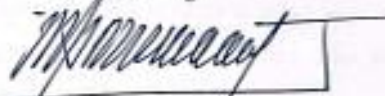
Judul Skripsi : Pembangunan Pelaksanaan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

Nama : Anye Ckristofer  
NPM : 1863201048  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 28 Agustus 2025

### Menyetujui

Pembimbing I



Drs. M Kasim., M.Si

NIDK. 8812.56.0018

Pembimbing II



Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos, M.Si

NIDN.1121.0385.03

### Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Abdul Hafid, S.P., M.P

NIK. 1986.065.012

### Penguji :

1. Drs. M Kasim., M.Si
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
3. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

1.   
2.   
3. 

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anye Ckristofer

NPM : 18.63201048

Judul skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Di Wilayah Apau Kayan (sudi di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupayen Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian Laporan Skripsi berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti akan mencantumkan sumber secara jelas.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Samarinda, 28 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



**Anye Ckristofer**  
**NPM. 18.6320.1048**

## RINGKASAN

Anye Ckristofer, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara), dibawah bimbingan Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Tisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Long Nawang), bagai mana pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Perkantoran, Sosial, Ekonomi dan Produksi dijalankan dan apa dampak yang dirasakan masyarakat. Jenis penelitian ini yaitu Kualitatif, Dalam ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu penelitian kepustakaan (Library research), penelitian lapangan (Field Work Research). Dengan menggunakan langkah-langkah analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara sudah dirasa cukup baik oleh masyarakat terutama yang ada di Desa Long Nawang. Pembangunan Infrastruktur ini sudah sesuai dengan Amanah Peraturan Presiden (Perpes) Rpublik Indonesia Nomor. 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. Yang menjadi pegangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang berada di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembangunan, Infrastruktur, Perbatasan Negara, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.**

## RIWAYAT HIDUP



Anye Ckristofer, lahir pada tanggal 19 Juni 1994, di Long Nawang. Merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari Bapak Ihin Surang, SE., M.Si dan Ibu Sulina Bilung, SE. Pendidikan dimulai pada tahun 2001 di Sekolah Dasar Negeri 008 Pelita Kanaan. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Malinau Kota dan SMP Negeri 1 Long Nawang, lulus pada tahun 2009 Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malinau dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) Program Studi Administrasi Publik. Pada tahun 2020 mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teras Nawang Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada tahun 2025 peneliti melakukan penelitian di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S-1).

## **KATA PENGANTAR**

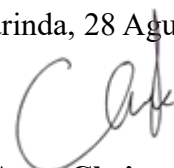
Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administari Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan serta gambaran terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Apau Kayan (Studi di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Utara). Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait atas dorongan serta dukungan yang telah diberikan kepada kepada peneliti, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman M.Pd, M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP.,MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari dan memahami ilmu sosial dan ilmu politik secara teoritis dan praktis.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, yang telah memberikan bimbingan ilmu mengenai Administrasi Publik dan izin serta persetujuan hingga peneliti diuji.
4. Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan ide-ide yang sangat bermanfaat dan berharga sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unifersitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang berharga sertamemberikan pelayanan yang baik dari awal mengenal bangku perkuliahan hingga akhir kuliah selama ini, demi kelancaran administrasi dan perkuliahan.

6. Bapak Stim Alam, SE. M.Si selaku Camat Kayan Hulu, Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang, Bapak Laheng Ibau kepala Adat, Bapak Pdt. Surang Bira selaku Tokoh Masyarakat dan Kepada seluruh Staf Desa, Ketua BPD, dan Ketua RT serta masyarakat desa Long Nawang yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Desa Long Nawang dan membantuan peneliti pada saat melakukan penelitian sehingga dapat berjalan dengan baik.
7. Sembah sujud dan terima kasih yang dalam kepada Ayah Ihin Surang dan Ibu Sulina Bilung yang selama ini memberikan dukungan dan dorongan yang kuat melalui Doa dan kasih sayang yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk Kakak Christina, Kaka Christian, Keponakan Brahmialino dan berserta seluruh keluarga yang terus memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih terutama kepada keluarga Besar yang ada di Long Nawang Kaka Roni Rorong, Kaka Margareta, kaka Merry serta teman-teman dari Club Badminton Bala Teliga, dan angkatan kelas 18-B yang telah banyak memberikan bantuan dan ikut serta berperan dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman KKN serta keluarga besar mahasiswa/i Administrasi Publik yang selalu setia memberikan semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan di Kota Samarinda.
11. Akhirnya kata peneliti sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta berharap skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Samarinda, 28 Agustus 2025



**Anye Ckristofer**  
NPM. 1863201048

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	4
1.4    Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1    Secara Teoritis .....	4
1.4.2    Secara Praktis .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
2.1    Pelaksanaan.....	5
2.2    Pembangunan.....	6
2.3    Infrastruktur .....	8
2.4    Perbatasan Negara .....	10
2.5    Kesejahteraan Masyarakat .....	13
2.6    Kerangka Pikir Penelitian .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>16</b>
3.1.    Jadwal Penelitian.....	16
3.2.    Jenis Penelitian.....	16
3.3.    Lokasi Penelitian.....	17
3.4.    Definisi Konseptual .....	17
3.5.    Fokus Penelitian.....	17
3.6.    Sumber Data.....	18
3.6.1.    Sumber Data Primer .....	18
3.6.2.    Sumber Data Sekunder .....	18
3.7.    Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.7.1.    Metode Wawancara.....	19
3.7.2.    Metode Observasi .....	20
3.7.3.    Analisis Data.....	20
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>23</b>
4.1    Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	23
4.1.1    Kondisi Geografis .....	23

4.1.2	Kondisi Demografis .....	24
4.1.2.1.	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	24
4.1.2.2.	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	25
4.1.2.3.	Data Penduduk Berdasarkan Agama .....	26
4.1.2.4.	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	26
4.1.2.5.	Wilayah Desa.....	27
4.1.2.6.	Struktur Pemerintahan Desa .....	27
4.1.2.7.	Kondisi Infrastruktur Desa.....	28
4.1.2.8.	Visi dan Misi Desa Long Nawang .....	29
4.2	Hasil Penelitian .....	29
4.2.1.	Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Negara .....	30
4.2.2.	Pembangunan Infrastruktur Perhubungan.....	31
4.2.3.	Pembangunan Infrastruktur Perkantoran.....	38
4.2.4.	Pembangunan Infrastruktur Sosial.....	44
4.2.5.	Pembangunan Infrastruktur Ekonomi.....	51
4.2.6.	Pembangunan Infrastruktur Produksi .....	56
4.2.7.	Faktor Pendukung dan Penghambat .....	64
4.3	Pembahasan .....	68
4.3.1.	Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan.....	69
4.3.2.	Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Jalan dan jembatan.....	70
4.3.3.	Pembangunan Infrastruktur Perkantoran.....	70
4.3.4.	Infrastruktur Soasial .....	71
4.3.5.	Pembangunan Infrastruktur Ekonomi.....	71
4.3.6.	Pembangunan Infrastruktur Produksi .....	72
4.3.7.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	73
4.3.7.1.	Faktor Pendukung.....	73
4.3.7.2.	Faktor Penghambat .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>75</b>
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>85</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1</b> Alur Kerangka Pikir Penelitian .....	15
<b>Gambar 3. 1</b> Analisis data model interaktif .....	21

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Rincian Jadwal Penelitian Tahun 2025 .....	16
<b>Tabel 4. 1</b> Jumlah Penduduk Desa Long Nawang Menurut Jenis Kelamin.....	25
<b>Tabel 4. 2</b> Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	25
<b>Tabel 4. 3</b> Data Penduduk Desa Long Nawang Menurut Agama .....	26
<b>Tabel 4. 4</b> Data Penduduk Desa Long Nawang Berdasarkan Mata Pencarian.....	26
<b>Tabel 4. 5</b> Data Pemerintahan Desa Long Nawang.....	28
<b>Tabel 4. 6</b> Sarana Prasarana Desa Long Nawang.....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Malinau merupakan satu Kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis letak Kabupaten Malinau adalah 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" BT dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" LU. Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Batas wilayah Kabupaten Malinau adalah di sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 40.088,38Km<sup>2</sup> dengan kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, yang termasuk dalam wilayah Apau Kayan. Desa Long Nawang sendiri merupakan salah satu Desa yang pembangunannya terutama dalam bidang infrastruktur menjadi prioritas pemerintah daerah sesuai dengan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam bentuk program prioritas pengembangan daerah perbatasan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain.

Apau Kayan sendiri adalah sebutan untuk masyarakat hukum adat yang terletak di Kabupaten Malinau yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, dan Kecamatan Sungai Boh.

Yang dimana salah satu kecamatannya yakni Kecamatan Kayan Hulu berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang baru diresmikan pada tahun 2024, serta pusat pemerintahan Kecamatan Kayan Hulu sendiri terletak di Desa Long Nawang.

Desa long Nawang adalah sebuah desa yang terletak dikecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya diwilayah Apau Kayan yang sangat dekat dengan wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. Pada zaman Penjajahan hindia Belanda wilayah ini sudah dipilih sebagai salah satu markas besar oleh pemerintahan Belanda untuk menguasai sumber daya dan karna letak yang sangat strategis bagi mereka. Maka dari itu pengembangan wilayah perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan wilayah perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif dari mulai pemerintah pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pengembangan wilayah perbatasan sediri ditujuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik. Tahun 2012, Pembangunan kawasan perbatasan memang telah menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan yang terkait kemiskinan serta ketertinggalan dalam suatu desa. Program ekonomi saat ini memprioritaskan infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya pembangunan daerah pedesaan haruslah menjadi suatu prioritas dan harus mendapat perhatian yang lebih serius untuk masa yang akan datang.

Di desa Long Nawang sendiri pembangunan infrastruktur di pedalaman /perbatasan khususnya infrastruktur jalan masih belum memadai sehingga

menyebabkan masyarakat kesusahan memenuhi kebutuhan sosial ekonominya selain jauh dari kota, masyarakat bahkan sulit memiliki akses jalan langsung ke kabupaten yang hanya menggunakan transportasi udara. Hal Ini menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat yang ada di daerah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena akses yang sulit juga menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi, seperti sembako dan material yang tiga kali lipat dengan harga di kota. Pembangunan Infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan dan perkantoran juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat karena untuk akses pendidikan, kesehatan dan administrasi masyarakat masi memilih ke ibu kota kabupaten atau ke kota lain, karena yang ada di desa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Berdasarkan dengan observasi awal yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa:

1. Akses jalan di Desa Long Nawang masi belum cukup memadai terutama akses keluar masuk Desa.
2. Saranan prasarana seperti pendidikan, kesehatan dan akses administrasi masi belum ada atau memadai.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Kayan Hulu khususnya di Desa Long Nawang?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan di Desa Long Nawang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan negara di Kecamatan Kayan Hulu khususnya Desa Long Nawang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

- a. Memberikan manfaat yang membangun dalam pengembangan Ilmu Sosial dan Politik.
- b. Digunakan sebagai rujukan dan informasi bagi penelitian yang membahas fenomena terkait.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah tingkat kecamatan untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Pelaksanaan**

Menurut Kamus Webster (dalam Abdul Wahab 2005:64) implementasi secara pendek berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika lihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Skripsi (Oktoriani), hal.33 Hakikat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan Perbandingan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Sebagaimana rumusan dari Mazmanian dan Sabartier dalam Abdul Wahab (2005:68-69) mengemukakan “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan”.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Abidin, (2004 : 199) ada dua konsep dasar berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Pertama konsep peralatan kebijakan (policy instruments). Peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau ingin dicapai (policy objective). Peralatan kebijakan ini berhubungan dengan sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur dan organisasi. Sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan adalah subjek dan sekaligus juga objek dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai subjek penjelasannya berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan.

Sebagai objek sumber daya manusia berkaitan dengan penerimaan suatu kebijakan. Kedua, konsep tentang kewenangan yang tersedia untuk melakukan pelaksanaan.

Mengenai kegagalan implementasi kebijakan, menurut Wibawa (dalam Abdul Wahab : 2008), implementasi kebijakan yang ditolak kelompok sasaran atau kelompok sasaran tidak menerima kebijakan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal yaitu :

- a) Kelompok sasaran tidak membutuhkan atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, ini dimungkinkan isi kebijakan tidak menyentuh kepentingan mereka.
- b) Kelompok sasaran tidak menyadari manfaat dari kebijakan tersebut dan oleh karenanya mereka tidak merasa membutuhkannya.
- c) Kelompok sasaran tidak menyukai birokrat pelaksanaannya.

## **2.2 Pembangunan**

Dalam (Sri Haryanti, dkk., 2016) Pengertian pembangunan ialah seperangkat usaha yang terencana dan terarah untuk menghasilkan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Aris Tri Haryanto, Siswanta., “dalam buku yang berjudul Teori Pembangunan” (2017 : Bab I) Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa.

Menurut W.W Rostow (dalam Ashriady, dkk., 2022) Pembangunan sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. (Rochajat, dkk., 2018:3) selain itu Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Subandi, (2016: 9) Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Menurut Soekanto (2005:437), Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan dikehendaki. Dari

pendapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, Sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari.

Berdasarkan uraian definisi pembangunan tersebut di atas, bahwa secara harfiah pembangunan mengacu pada upaya memperhatikan pembangunan dari waktu ke waktu *sustainable* artinya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai konsep pembangunan suatu daerah yang berfokus pada kebutuhan saat ini, tanpa menghancurkan lingkungan. Hal ini dilakukan, agar pada masa yang akan datang, generasi selanjutnya masih dapat menikmati berbagai Sumber Daya Alam dan dapat tinggal dilingkungan yang layak. Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa.

(Bappenas, 2019) Pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keadilan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah perbatasan, sebagai berikut) :

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan wilayah perbatasan bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keamanan, dan pertahanan.

b. Pemerataan Pembangunan

Pembangunan wilayah perbatasan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh.

c. Keadilan

Pembangunan wilayah perbatasan bertujuan untuk memberikan keistimewaan kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah daerah yang masih lemah.

d. Koordinasi Antar Instansi

Pembangunan wilayah perbatasan membutuhkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

e. Peningkatan Akses Pelayanan

Pembangunan wilayah perbatasan bertujuan untuk menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi, sehingga kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam berbagai aspek, yaitu pertahanan-keamanan, perekonomian-perdagangan, dan sosial-kebudayaan.

Terkait dengan Long Nawang ibukota kecamatan kayan hulu adalah wilayah perbatasan negara Provinsi Kalimantan Utara dengan Serawak Malaysia, dalam bidang sosial meliputi: fasilitas pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA), fasilitas kesehatan, fasilitas pasar, fasilitas air bersih, fasilitas jaringan listrik dari PLN, dan fasilitas jalan dan jembatan desa serta akses transportasi darat wilayah perbatasan negara.

Pengukuran keberhasilan pembangunan dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Negara-negara yang masih dalam kategori berkembang kemungkinan besar akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti Akses masuk dan keluar desa, listrik di perdesaan, layanan kesehatan, air bersih dan harga pangan yang terjangkau.

### 2.3 Infrastruktur

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya. Menurut (Aldillah 2020 : 43) Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Menurut Hudson, (1997 dalam Aldillah, 2020 : 60) infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Terdapat tiga jenis infrastruktur, yaitu infrastruktur fisik yang wujud dan nyata serta kegunaannya berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut, seperti jalan dan bangunan gedung. Infrastruktur non-fisik hanya bisa dirasakan manfaatnya dan dampaknya ketika digabungkan dengan infrastruktur fisik seperti pasokan listrik dan ketersediaan air bersih. Berdasarkan uraian tersebut, Infrastruktur merupakan;

- a. Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik,
- b. Sistem fisik dasar dari sebuah bisnis atau bangsa; transportasi, komunikasi, limbah, air dan sistem listrik merupakan contoh infrastruktur, sistem infrastruktur cenderung investasi biaya tinggi, tetapi sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kemakmuran suatu negara.

Dengan demikian, infrastruktur fisik wujud modal publik yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, untuk investasi pemerintah yang dilakukan. Oleh karena itu, Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya dengan menyediakan konektivitas yang memfasilitasi masyarakat dan memobilisasi manusia, barang, dan jasa dari satu tempat ke tempat lain. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendukung pelayanan dasar dengan menghubungkan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional serta meningkatkan produktivitas, daya saing, dan peluang investasi.

Pembangunan Infrastruktur Menurut Grigg (dalam Kodoatie 2003:32) bahwa “sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-

struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalsi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat”.

#### **2.4 Perbatasan Negara**

Bappenas, (2021) Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan adalah konsep geografis - spasial. Sebagai konsep geografis, masalah perbatasan akan terselesaikan ketika kedua Negara yang memiliki wilayah perbatasan yang sama menyepakati batas-batas wilayah negaranya. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara “Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional”. Perbatasan sebuah negara (State’s Border) dapat dipandang dalam konsep batas negara sebagai sebuah ruang geografis (Geographical space) dan atau batas negara sebagai ruang sosial budaya (social-culture space).

Berdasarkan konsep batas negara tersebut dilakukan kajian-kajian dan analisis terkait permasalahan batas wilayah antar negara. Permasalahan batas negara dapat berupa permasalahan batas darat dan atau batas laut yang dapat meliputi permasalahan teknis dan nonteknis. Terdapat tiga aspek pokok yang menjadi permasalahan batas wilayah negara dalam kerangka penyelesaian masalah, ketiga aspek tersebut adalah aspek kelembagaan, aspek Hukum dan aspek teknis. Ketiga aspek tersebut memiliki korelasi yang perlu

difungsikan secara optimal dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam memberikan kerangka penataan kawasan perbatasan yang mengedepankan aspek kesejahteraan. Perbatasan (border) dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Namun sesungguhnya pengertian mengenai perbatasan tidak sesederhana itu, karena di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi, yaitu antara lain garis batas (Border Line), sepadan (boundary) dan perhinggaan (frontier) yang tentunya dapat memunculkan persoalan politik. Konsep garis batas tidak saja merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum antar kedua negara, tetapi juga merupakan titik singgung (contact point) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan.

Berdasarkan definisi dan karakteristik perbatasan, O.J. Martinez (dalam Arifin, 2014), mengelompokan perbatasan dalam empat tipe :

- a. *alienated borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, serta persaingan etnik.
- b. *coexistent borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya alam yang strategis di perbatasan.
- c. *interdependent borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu dari pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

- d. *integrated borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang kegiatan perekonomiannya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Menurut Guo (dalam Arifin, 2014), perbatasan (border) mengandung pengertian sebagai pembatas suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda. Menurut O.J. Martinez (dalam Arifin, 2014), Berdasarkan definisi dan karakteristik perbatasan mengelompokan perbatasan dalam empat tipe. Pertama, *alienated borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, serta persaingan etnik. Kedua, *coexistent borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya alam yang strategis di perbatasan. Ketiga, *interdependent borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu dari pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Keempat, *integrated borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang kegiatan perekonomiannya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat. Dari teori yang dikemukakan oleh Martinez diatas, peneliti mengkategorikan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia termasuk diantara tipe ketiga dan keempat, yaitu *interdependent borderland* dan *integrated borderland*.

## 2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Sunarti, (2015 : 43), Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut (Pramata, dkk 2015 : 28) Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan

Menurut (Liony, dkk, 2016 : 38), Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Menurut Dwi, (2008 dalam Widyastuti 2015: 58 ), Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.

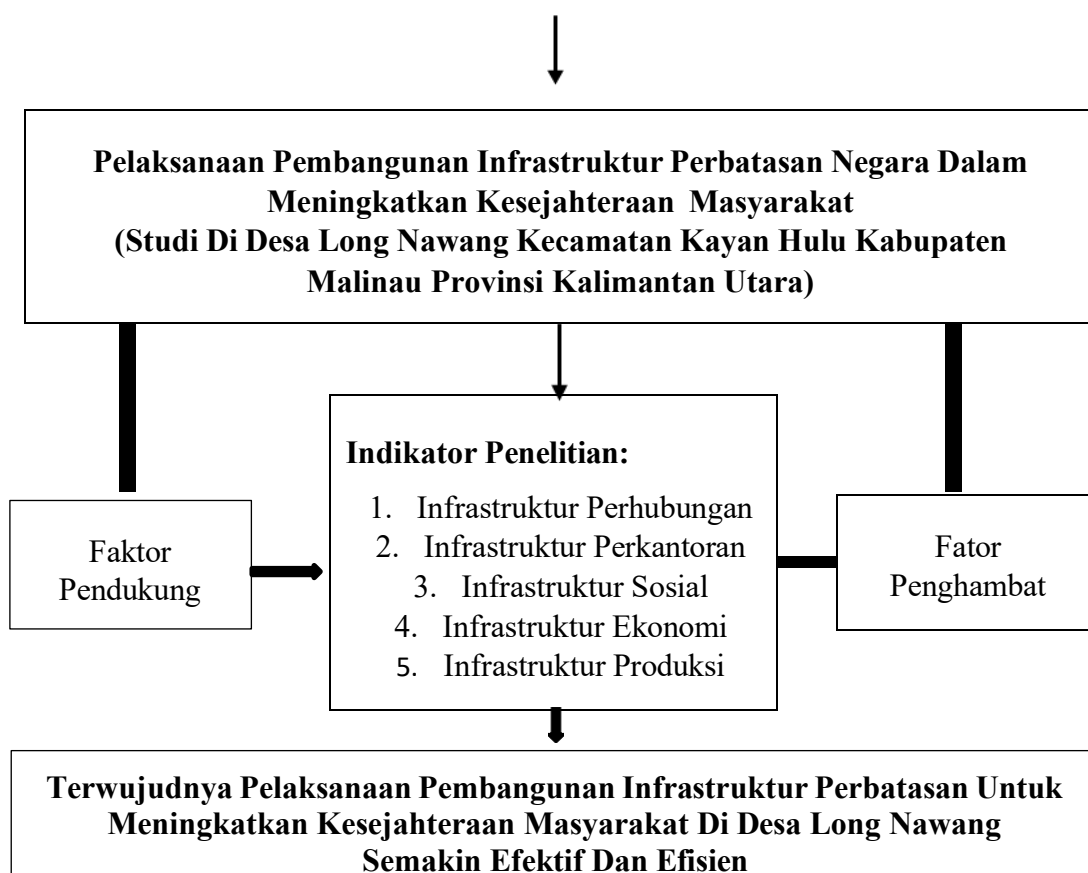
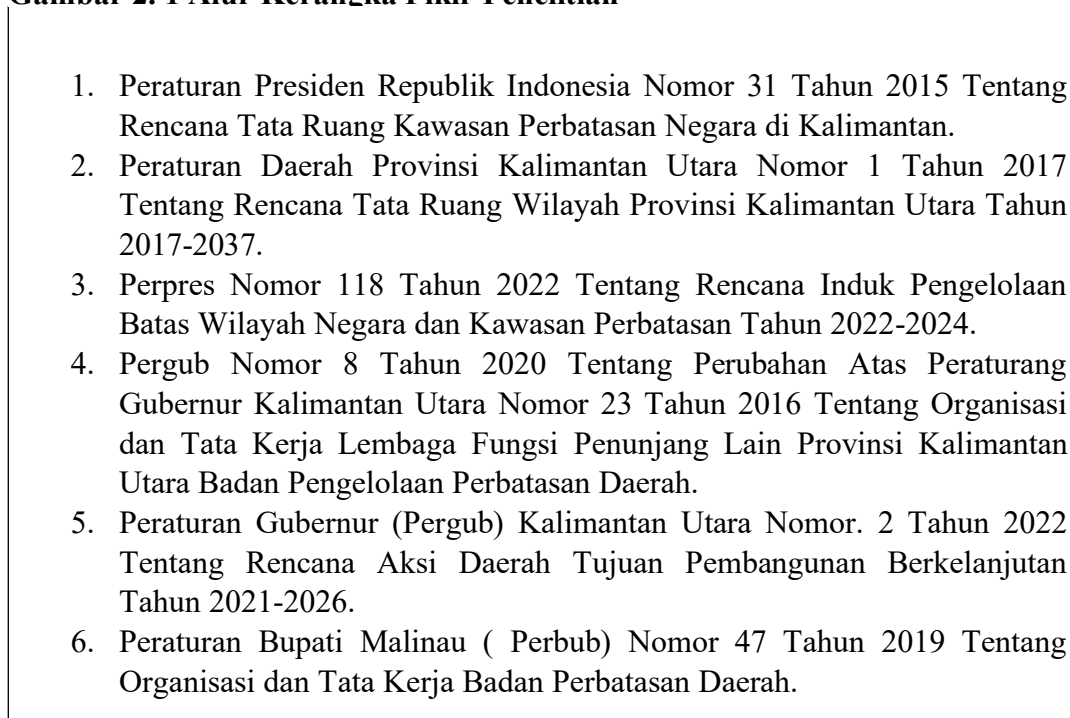
Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang “Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga”. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan dasar hidup terdapat beberapa indikator,yang

terkait dengan kawasan perbatasan negara sebagai berikut : infrastruktur ruas-ruas jalan desa, fasilitas air bersih, fasilitas pasar, fasilitas jaringan listrik dari PLN, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dasar dan menengah, fasilitas jaringan komunikasi dan informasi, fasilitas terminal kendaraan transport darat, dan fasilitas jasa paket barang,

## **2.6 Kerangka Pikir Penelitian**

Dalam penelitian ini, diperlukan kerangka berpikir penelitian, karena dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkaitan dengan fokus penelitian. Lihat di gambar 2.1:

**Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber: Dibuat oleh peneliti

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan berkisar selama 3 bulan terhitung dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan laporan. Adapun rincian tersebut, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Rincian Jadwal Penelitian Tahun 2025**

No	Uraian	Mei				Juni				Juli							
		Minggu ke-															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusunan Proposal dan pembimbingan																
2.	Revisi dan Pengesahan Proposal																
3.	Ujian Proposal Skripsi																
4.	Pelaksanaan Penelitian																
5.	Pengolahan Data																
6.	Penyusunan Laporan																

*Sumber : dibuat oleh peneliti, 2025*

### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam Sugiyono, (2017 : 35), Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggabungkan penelitian deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Hasil data apa adanya tanpa manipulasi atau perlakuan lain,
- b. Menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya.
- c. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan, atau dari bentuk tindakan kebijakan .
- d. Peneliti menjadi bagian dari instrumen pokok analisisnya

Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi tempat penelitian adalah : Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, merupakan :

- a. Kawasan perbatasan negara, sehingga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
- b. Infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan
- c. Pembangunan Infrastruktur di segala bidang.

### **3.4. Definisi Konseptual**

Hair et al, (2016) Definisi konseptual membantu peneliti dalam memahami dan mengoperasionalkan variabel yang akan diukur dan memastikan pemahaman yang konsisten dalam konteks penelitian. Yang dimaksud dengan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Kondisi yang menunjukkan tentang keadaan pembangunana yang telah dilakukukan oleh pemerintah daerah/pusat di wilayah perbatasan negara (Apau Kayan) Kecamatan Kayan Hulu Long Nawang serta kondisi kesejahteraan Masyarakatnya, yang Meliputi: Pembangunan infrastruktur Perhubungan, Perkantoran, Sisoal, Ekonomi dan Produksi.

### **3.5. Fokus Penelitian**

Penelitian ini tentang Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Adapun fokus penelitian berdasarkan Perpres Nomor. 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022-2024. Peneliti berfokus pada 5 infrastruktur, Yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur Perhubungan
2. Pembangunan infrastruktur Perkantoran
3. Pembangunan infrastruktur Sosial

4. Pembangunan infrastruktur Ekonomi
5. Pembangunan infrastruktur Produksi

### 3.6. Sumber Data

Moleong, (dalam Sugiyono, 2015: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi. Dengan demikian, sumber data terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3.6.1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis dan sumber data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tanpa melalui perantara), baik itu individu maupun kelompok. Sumber data primer penelitian ini, terdiri atas :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Stim Ala, SE, Msi	Camat	Key Informen
2	Lukas Bilung	Kepala Desa	Informen
3	Laheng Ibau	Kepala Adat	Informen
4	Pdt. Surang Bira	Tokoh Masyarakat	Informen
5	Yahuda Jhon S.Pd.	Sekdes	Informen
6	Jhoni Laheng, SE.	Kaur Perencanaan	Informen

Sumber: Dibuat oleh peneliti

#### 3.6.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. (Uma Sekaran, 2011), Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015 : 402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.7. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.7.1. Metode Wawancara

Moleong, (2011 : 186), *Interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Sehingga dapat diketahui bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui teknik wawancara ini penulis dapat menggali informasi dengan reliabilitas dan validitas informasi setinggi mungkin.

Menurut Sugiyono, (2015 : 410), Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif (*inner perspectives*) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu.

Peneliti dalam melaksanakan penelitian menggunakan metode *interview* bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Melalui teknik wawancara, peneliti mengadakan komunikasi langsung dan melakukan tanya jawab kepada *key informan*, informan, dan responden untuk memperdalam informasi yang diperoleh dari tehnik pengumpulan data yang lain.

Pengajuan pertanyaan dilakukan secara bebas kepada subyek menuju fokus penelitian dan dilakukan dalam suasana biasa sehingga tidak terlihat kaku. Dalam hal ini, penulis berinteraksi langsung dengan *key informan*, informan, dan responden dengan fokus penelitian guna memperoleh data, sehingga validitas data tersebut akurat.

### **3.7.2. Metode Observasi**

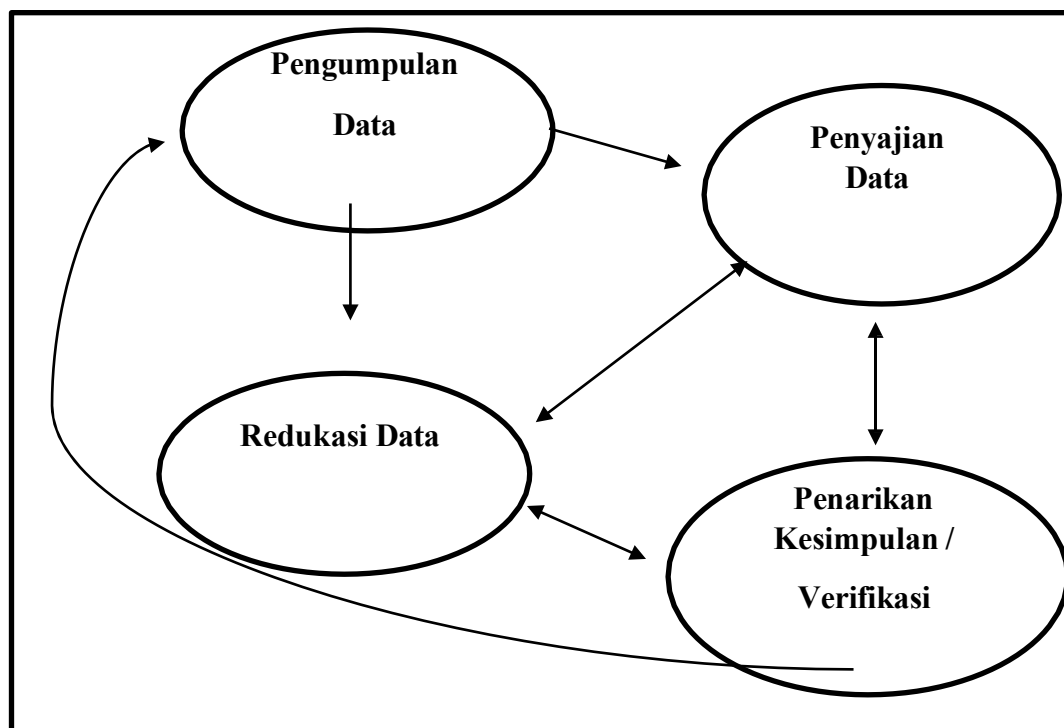
Moleong, (2011:175), Observasi partisipatif (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Observasi adalah suatu penelitian sistematis dengan menggunakan kemampuan indera manusia yang ada pada saat terjadi aktifitas budaya dan wawancara secara mendalam, karena penggunaan observasi secara metodologis yaitu observasi mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya yang memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, sehingga observasi diklasifikasikan ke dalam bentuk observasi partisipatif, observasi tidak terstruktur, dan observasi terang-terangan dan samar.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, observasi atau pengamatan yang akan digunakan adalah observasi partisipatif dimana peneliti melihat langsung kondisi tempat, pelaku, dan kegiatan internalisasi nilai nasionalisme di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

### **3.7.3. Analisis Data**

Analisis data menggunakan metode Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2014 : 404), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh: lihat pada (Gambar 3.2).Hal,20.

**Gambar 3. 1 Analisis data model interaktif**



**Sumber Gambar :** Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020: 134)

**Data Collection (Pengumpulan Data).** Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Jadi dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin dari lapangan, selanjutnya mereduksi data, mendisplay data, dan kemudian menyimpulkan data.

**a. Data Reduction (Reduksi Data).** Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis meliputi wawancara, tes, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang jelas dari data tersebut sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah

diperoleh mulai dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas. Setelah data terkumpul maka peneliti mulai memfokuskan dan menyederhanakan, dan mengumpulkan data mengenai Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Long Nawang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Data Display (Penyajian Data).** Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data hasil reduksi secara naratif sehingga penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dapat dilakukan dengan tepat. Data yang mau disajikan dalam penelitian ini yaitu sekumpulan informasi tentang Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Long Nawang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan).** Pada tahap ini penarikan kesimpulan, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna dan serta memberikan penjelasan. Selanjutnya apabila penarikan kesimpulan dirasakan tidak kuat, maka perlu adanya verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data dilapangan. Verifikasi adalah menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data. Kesimpulan adalah dengan reduksi data dan penyajian data. Maka kesimpulannya nantinya dapat diketahui tentang Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Long Nawang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya apabila penarikan kesimpulan dirasakan tidak kuat, maka perlu adanya verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data dilapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian, mengetahui lokasi yang diteliti yaitu Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara berkaitan dengan penelitian ini, maka yang harus peneliti ketahui adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial dan ekonomi serta gambaran subjek penelitian berdasarkan Profil Desa Long Nawang. Dalam bab ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan profil desa Desa Long Nawang merupakan desa yang berada di Ibu Kota kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau, Secara geografis Desa Long Nawang memiliki luas wilayah sekitar 258,560 hektar dan terletak di bagian timur Kabupaten Malinau dan berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Dan disana merupakan masyarakat adat yang masi sangat kental dengan adat istiadat atau budaya dari nenek moyangnya.

##### **4.1.1 Kondisi Georafis**

Secara georafis, Desa Long Nawang terletak dalam wilayah Apau Kayan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau yang dimana berbatasan langsung dengan 3 desa dan 1 perbatasan negara, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Long Metun
- b. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Nawang Baru
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Long Ampung
- d. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Serawak Malaysia

Desa Long Nawang memiliki 2 iklim sama seperti kebanyakan desa-desa yang ada di indonesia yakni musim hujan dan kemarau, yang dimana secara tidak langsung mempengaruhi pola pertanian yang ada di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu.

Akses menuju Desa Long Nawang hanya terdapat 2 akses darat dan udara, untuk akses udara yakni menggunakan pesawat perintis yang dimana jika tidak ada gangguan cuaca penerbangan memerlukan waktu sekitar +45 menit dengan jarak tempuh 300 Km dari ibu kota Kabupaten Malinau, dan jika menggunakan jalur darat untuk sekarang aksesnya hanya ada dari Samarinda Kalimantan Timur yang memiliki jarak tempuh yang cukup lama tergantung kondisi cuaca yakni capat 3-7 hari dan terlama 1-2 bulan. Hal ini bisa terjadi karena kondisi medan yang ditempuh masih berupa jalan bekas loging/jalan perusahaan kayu dan terkadang terjadi banjir atau jembatan yang putus.

#### **4.1.2 Kondisi Demografis**

Desa Long Nawang pada awal berdirinya mayoritas penduduknya adalah etnis suku Dayak Kenya (100 %), namun kini sudah mulai beragam suku, mulai masuknya etnis lain karna adanya perkawinan dengan suku lainnya, tetapi jumlahnya sendiri tidak banyak. Desa Long Nawang Juga merupakan salah satu desa tertua yang ada di wilayah Apau Kayan dan untuk kebanyakan penduduknya masih menandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya sisanya adalah aparatur sipil negara (ASN), pegusaha, dan banyak juga yang memilih merantau ke-Malaysia untuk mencari pekerjaan. Desa Long Nawang sendiri memiliki jumlah penduduk 1.154 jiwa yang terdiri dari 582 laki-laki dan 572 perempuan, dengan jumlah penduduk yang dapat dikatakan banyak untuk suatu Desa dan demi kenyamanan masyarakatnya, Pemerintah Desa Long Nawang sendiri sudah banyak melakukan pembenahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan sosial, ekonomi, akses kesehatan dan pendidikan.

##### **4.1.2.1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pada tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Desa Long Nawang berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebagai berikut, lihat (tabel 4.1), Hal.24 :

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Long Nawang Menurut Jenis Kelamin.**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa (Orang)
1	Laki-Laki	582
2	Perempuan	572
<b>Jumlah</b>		<b>1.154</b>

*Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui mengenai jumlah penduduk Desa Long Nawang yaitu 1560 Jiwa Orang yang terdiri dari 848 Laki-Laki dan 713 Perempuan.

#### 4.1.2.2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam menunjang pembangunan dan kemajuan di masa mendatang, untuk itu pendidikan menjadi salah satu hal yang harus diutamakan dalam pembangunan suatu Daerah, kerna dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pada ekonomi yang dimana akan mendorong tumbuhnya kewirausahaan serta dapat menciptakan lapangan kerja baru, hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam menuntaskan pengangguran dan kemiskinan terutama untuk daerah tertinggal/ pelosok. Berikut adalah data Penduduk Desa Long Nawang Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

**Tabel 4. 2 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tamat Sekolah Dasar (SD)	284
2	Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	197
3	Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)	276
4	D1-D3	12
5	S1	131
6	S2	4
<b>Jumlah</b>		<b>886</b>

*Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023*

lanjut Tabel 4.2. Menunjukkan bahwa penduduk di Desa Long Nawang apabila dilihat dari tingkat pendidikan, masih ada penduduk yang pendidikannya tertinggal karna masih banyak penduduk yang lebih mementingkan pendapat/mencari kerja dari pada pendidikan. Namun sekarang Masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan dapat dilihat pada tabel diatas lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Lulusan S1, S2 sudah banyak dan hal ini akan terus meningkat dari tahun ke-tahun, mengingat masih banyak yang menempuh pendidikan diluar Daerah.

#### 4.1.2.3. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Pada tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Desa Long Nawang berdasarkan Agama, yaitu:

**Tabel 4. 3 Data Penduduk Desa Long Nawang Menurut Agama**

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1	Kristen Protestan	1.145
2	Kristen Katolik	-
3	Islam	10
	<b>Jumlah</b>	<b>1.154</b>

*Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel diatas mayoritas Penduduk Desa Long Nawang beragama Kristen Protestan.

#### 4.1.2.4. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Mata Pencarian adalah berupa pekerjaan pokok Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, Berikut adalah data jumlah Penduduk Desa Long Nawang Berdasarkan Mata Pencarian:

**Tabel 4. 4 Data Penduduk Desa Long Nawang Berdasarkan Mata Pencarian.**

No.	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)
1	Petani	386
2	Aparatur Sipil Negara (ASN)	55
3	TNI/Polri	40
4	Perdagang	29
5	Penyedia Jasa	15
6	Pensiunan	6
	<b>Jumlah</b>	<b>531 Orang</b>

*Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2023*

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan Penduduk Desa Long Nawang mayoritas sebagai Petani yaitu 712 Orang, dan tidak atau belum bekerja berjumlah 646 hal ini di karna kan masi banyak yang bersekolah, menjadi Ibu Rumah Tangga dan sebagian sebagai Pensiunan.

#### **4.1.2.5. Wilayah Desa**

Desa Long Nawang terletak di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Letak topografis Desa Long Nawang berada di ketinggian bukit tropis dengan rentang elevasi tinggi antara 574 - 791 m yang artinya Desa Long Nawang berada di dataran tinggi/perbukit yang dimana sekitar 70% nya daratan digunakan Masyarakat untuk Pemukiman, Peternakan, dan sisanya sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Desa Long Nawang terdiri dari 5 RT.

#### **4.1.2.6. Struktur Pemerintahan Desa**

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susnan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja badan Daerah Kabupaten Malinau. Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja badan daerah, yang mencakup dinas-dinas terkait dengan Pemerintahan Desa. Dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 56 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Desa. Peraturan ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, dan Fungsi serta tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Malinau.

juga merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menetapkan struktur perangkat desa. Berikut ini merupakan data Aparatur Pemerintahan Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dapat di lihat pada (tabel 4.5):

**Tabel 4. 5 Data Pemerintahan Desa Long Nawang**

No.	Nama	Jabatan
1	Lukas Bilung	Kepala Desa
2	Yahuda Jhon, S.Pd	Sekretaris Dasa
3	Perin Merang	Kasi Pemerintahan
4	Surang Alung	Kasi Pelayanan
5	Jhony Bid Ngang	Kasi Kesejahteraan
6	Jhoni Laheng, SE.	Kaur Perencanaan
7	Piner Bit, S.KM	Kaur Keuangan
8	Ridin Ului, S.Sos	Kaur Tata Usaha Umum
9	Alvris Karyawati	Bendahara

Sumber: Profil Desa Long Nawang Tahun 2024

#### 4.1.2.7. Kondisi Infrastruktur Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Long Nawang secara besar adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 6 Sarana Prasarana Desa Long Nawang**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Paud	1 unit
2	Sekolah Dasar	1 unit
3	SMP	1 unit
4	SMA	1 unit
5	Kantor Camat	1 unit
6	Kantor Desa	1 unit
7	Kantor Polsek	1 unit
8	UPTD Pendidikan	1 unit
9	UPTD PUSKESMAS	1 unit
10	Bank BPD Kaltim Tara	1 unit
11	PLN Desa Long Nawang	1 unit
12	Kantor PLBN Long Nawang	1 unit
13	Gedung Olahraga	1 unit
14	Jalan Aspal	1 kilo
15	Gereja	2 unit
16	Musolah	1 unit

Sumber: Profile Desa Long Nawang Tahun 2023

Berdasarkan Tabel (4.5) diatas diketahui Sarana dan Prasarana Umum Desa Long Nawang terdiri dari Gedung Sekolah seperti Paud/Tk,SD,SMP,SMA masing-masing 1-Unit. Kantor Camat, Kantor Desa, Kapolsek, UPTD Pendidikan, UPTD PUSKESMAS, Bank, PLBN, Gedung Olahraga masing-masing berjumlah 1-Unit.

Untuk kegiatan keagamaan Desa Long Nawang Memiliki 2-Unit Gedung Gereja, dan 1-Unit Musholah, Ada juga Jalan Aspal sepanjang 1 Km yang telah terealisasi.

#### **4.1.2.8. Visi dan Misi Desa Long Nawang**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yang dimana melalui proses dan digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintah desa sesuai dengan kewenangan desa. Visi Desa Long Nawang” Terwujudnya Masyarakat Desa Long Nawang yang maju dalam Infrastruktur dan Pertanian”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan atau dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pemersatu gerak/langkah serta tindakan nyata bagi komponen penyelenggaraan pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Desa Long Nawang adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Membangun semangat Otonomi desa yang bermakna bagi kehidupan masyarakat.

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Desa Long Nawang adalah salah satu desa yang membutuhkan perhatian khusus baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, karena berada di wilayah perbatasan antara Malaysia-Indonesia, salah satu yang sangat di butuhkan dan harus di prioritaskan iyalah Pembangunan Infrastruktur yang layak untuk mendukung kehidupan dan aktifitas masyarakat, dalam hal ini untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Infrastruk Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara). Maka peneliti terjun langsung kelapangan dalam melaksanakan penelitian seperti pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Berikut ini adalah uraian hasil

wawancara peneliti di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, sebagai berikut.

#### **4.2.1. Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Negara**

Pembangunan infrastruktur perbatasan merupakan suatu upaya strategis pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana dasar di wilayah perbatasan negara. Wilayah perbatasan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi wilayah kedaulatan negara sekaligus pintu gerbang interaksi sosial, ekonomi, dan politik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga untuk memperkuat kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah.

Jenis infrastruktur yang dibangun di wilayah perbatasan meliputi infrastruktur dasar (jalan, jembatan, perkantoran, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan), infrastruktur ekonomi (pasar, bank). Kehadiran infrastruktur ini menjadi pondasi dalam meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan amanah Perpres No. 118 Tahun 2022 Tentang: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024. Yang dimana merupakan kerangka nasional untuk pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menyusun dan menetapkan :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. Menetapkan Pergub dan Perbup/Perwali terkait pengelolaan perbatasan
- c. Mengintegrasikan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kawasan perbatasan
- d. Mengatur arah kebijakan pembangunan berbasis pertahanan, ekonomi, sosial-budaya, dan tata ruang di perbatasan.

- e. Pasal 4 & Lampiran Perpres 118 Tahun 2022 menyebut bahwa pemerintah daerah wajib menyesuaikan perencanaan sesuai rencana induk ini.

Dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dan Tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara No. 2 Tahun 2022 juga menjadi acuan pemerintah Kabupaten malinau yang dimana pergub ini berisi tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2026 mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistematika; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup dan Peraturan Bupati No 47 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja badan pengelola perbatasan daerah.

#### **4.2.2. Pembangunan Infrastruktur Perhubungan**

- a. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/ menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan ?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE., M.Si Selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

”Menurutnya Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat memang terlibat dalam perencanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Long Nawang yang dimana dilakukan secara bertahap. Menurut Beliau salah satunya dengan diadakannya Musyawara Desa (Musdes) untung mendengar usulan Masyarakat, yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Muserenbang) tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Yang kemudian diteruskan ke-Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Beberapa Infrastruktur Jalan dan Jembatan memerlukan dukungan APBN dari Pemerintah Pusat karna keterbatasan

Aggaran Pendapantan Belanja Daerah APBD yang ada. Salah satu bukti adalah dengan adanya Pembangunan PLBN di Desa Long Nawang dan Perbaikan jalan menuju PLBN Desa Long Nawang” .(Wawancara 25-28 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Menurutnya untuk Pambangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan memang sudah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini juga menjadi salah satu topik utama pembahasan dalam Musyawara Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pemerintah pusat sendiri mendukung melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) bahkan sudah dikerjakan oleh Pihak Ke-3. Yang sudah diaspal ada sekitar 3 Km”.( Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Menurutnya salah satu bukti Pemerintah menyusun tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah adanya program Pemerintah merlalui program Pemeintah Kabupaten Malinau (Gardema) akan dibangun atau ditambahkannya jalan dan jembatan menuju PUSKESMAS dan TPU Desa Long Nawang atas usulan dan permintaan masyarakat dalam dalam rapat Musdes dan Musrenbang ”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Menurutnya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan memang dulu sangatlah sulit, tetapi semenjak semenjak Pemerintah mulai memprioritaskan wilayah perbatasan menjadi harapan bagi Masyarakat Desa Long Nawang untuk lebih diperhatikan melalui program-program Pemerintah baik itu dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Salah satu bukti program Pemerintah yang sudah dijalankan berupa pengadaan alat berak seperti Eksapator melalui APBD Pemerintah Daerah. Hal serupa juga terjadi dalam pembangunan jembatan besi (Jembatan utama yang menjadi titik akses penghubung darat ke Desa-desa tetangga), yang dulu sebelumnya hanya berupa Jembatan gantung yang sudah berusia puluhan tahun”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Menurutnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah wajib terlibat dalam perencanaan dan pembangunan Infrastruktur yang ada diperbatasan, seperti Jalan dan Jembatan. Karna lanjutnya jika hanya mengendalakan salah satunya saja maka pembangunan yang diharapkan akan memakan waktu yang lama untuk terwujud. Pemabangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebenarnya sudah lama masuk dalam program Pemerintah Kabupaten Malinau tetapi tidak terealisasi karna masalah anggaran yang terbatas dan sulitnya akses Menuju Wilayah Perbatasan”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“mengatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui sinergi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)”.(Wawancara 3 Juli 2025)

- b. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan Masyarakat di Wilayah Perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

”Menurutnya Pembangunan Infrastruk terutama di Desa Long Nawang sangat luar biasa, sesuai dengan data-data yang ada untuk jalan dan jembatan yang belum di aspal ataupun belum disemenisasi kurang lebih sekitar 600-1000 m, mengenai jembatan untuk sekarang terutama di Wilayah Desa Long Nawang dirasa sudah cukup dan layak digunakan Masyarakat untuk beberapa tahun kedepan, jikapun memang diperlukan penambahan pembangunan jembatan anggarannya sudah disiapkan jika memang diperlukan, bahkan jika dalam keadaan terdesak seperti roboh akibat bencana alam masyarakat siap untuk bergotong royong membangun jembatan untuk digunakan sementara. Sementara untuk jalan yang sudah dibangun baik itu pengaspalan ataupun di semenisasi suda sekitar 3.5 km. Artinya sudah melebihi lima Puluh persen dan mendekati Tujuh Puluh persen Infranstruktur Jalan yang sudah dibangun atau di tingkatkan baik itu pegaspalan ataupun semenisasi. Lanjutnya dengan adanya Pembangunan Infrastruktur

Jalan dan Jembatan Masyarakat sangat antusias karna selama ini akses Masyarakat yang ada di Wilayah Perbatasan cukup sulit karna kondisi geografis yang terpencil dan terbatasnya jalur transportasi. Dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan yang lebih baik, mobilisasi warga menjadi lebih lancar, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara khusus beliau menyorida pembangunan Jalan dan Jembatan yang menuju Pos Lintas Batas Negara ( PLBN). Yang dimana menurutnya selama ini sudah dikerjakan oleh pihak ke-3 atau yang dipercaya oleh Pemerintah PT. Duta Perkasa namun pengerjaannya hanya sampai 3 Km yang diaspal dan sisanya masi agregat, untuk jembatan sendiri diharapkan adanya proses peningkatan dan perawatan. Dia juga menyoroti tentang proses pengaspalan baik itu yang menuju ke PLBN maupun yang ada dipemukiman yang dimana menurutnya setelah selesai dikerjakan belum sampai 2 bulan aspalnya sudah mulai terkelupas dan berlobang. Kerna jika dilihat dari segi kepentingan manfaat dan kepentingan Jalan yang menuju ke PLBN adalah satu-satunya akses bagi masyarakat Desa Long Nawang untuk menuju ke Serawak Malaysia, baik itu untuk berbelanja kebutuhan pokok maupun mencari pekerjaan”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Menurutnya Jalan dan Jembatan yang ada di Desa Long Nawang Merupakan Jalan dan Jembata ibu kota Kecamatan tetapi baru saja dibangun sudah terkelupas, padahal jalan yang sudah di aspal sudah mencapai 80 persen tahap pemabngunannya dan yang tersisa hanya jalan dan gang kecil saja yang belum diaspal, serta ada sebagian kecil jalan yang sudah selesai di semenisasi. Tetapi menurutnya juga setelah adanya Pembangunng Jalan menjadi lebih luas sehingga Kendaraan seperti mobil bisa masuk ke dalam desa dan mempermudah Masyarakat dalam beraktifitas, seperti berdagang dan berpergian. karna sebelumnya jalan yang ada hanya bisa dilewati kendaraan sepeda motor jadi jika ingin berpergian terutama jika membawa banyak barang masyarakat akan memilih naik perahu yang tentunya beresiko dan memakan waktu yang lama.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan jembatan. Yang sudah terealisasi di Desa Long Nawang sudah cukup memuaskan, karena sebelum dibangun oleh Pemerintah jalan sebelumnya hanya memiliki Ruas jalan paling luas Sekitar 2 meter, hanya sebagian saja disemenisasi dan sisanya agregat dan jalan tanah. Setelah adanya pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembata oleh Pemerintah, sekarang jalan terutama jalan utama yang ada dipemukiman sudah diperluas sehingga memungkinkan kendaro roda 4 untuk masuk ke Desa dan sudah hampir semua di aspal dan disemenisasi, sehingga lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses atau memobilisasi kebutuhannya. Untuk jembatan sudah banyak yang diganti dan sebagian ditingkatkan menjadi jembatan permanen, yang dimana sebelumnya hanya berupa jembatan kayu dan Jembatan gantung”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan memang sudah menjadi lebih baik dari pada yang sebelumnya, namun bisa dikatakan bahwa belum sepenuhnya memadai. Kerna masi ada beberapa titik yang memerlukan perhatian. Kondisi geografis di Desa Long Nawang sendiri berada di daerah perbukitan dan rawan akan longsor yang membuat perawatan jalan menjadi sulit. Selain itu Jembatan yang ada memang bisa digunakan tetapi sama halnya dengan jalan masi terdapat beberapa titik yang perlu perhatian karna kondisi geografis di Desa Long Nawang itu sendiri. Sebelum adanya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan akses transportasi sangat sulit karna kondisi jalan rusak dan jembatan banyak yang ambruk, dengan adanya pembangunan Jalan dan Jembata oleh Pemerintah, mobilitas masyarakat menjadi lancar, terutama untuk distribusi kebutuhan pokok, hasil pertanian, dan akses layanan kesehatan maupun pendidikan ”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Pembanguana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang ada saat ini memang sangat terasa bagi masyarakat, terutama karena akses transportasi menjadi lebih lancar dan aman, dibandingkan dengan sebelumnya yang dimana jalan masi berupa tanah atau agregat. Lanjutnya masih ada beberapa titik atau ruas jalan yang belum di aspal, dan ada beberapa jembatan yang hanya bersifat darurat atau

semi permanen. Untuk kondisi sekarang terutama karna Desa Long Nawang berada di daerah terpencil/ pelosok serta akses dan kondisi geografisnya. Pembangunan Infrastruktur terutama Jalan dan Jembata masyarakat sudah merasa sudah cukup puas karna adanya upaya Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan Masyarakat di Wilayah Perbatasan ”.(Wawancara 3 Juli 2025)

- c. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas Infrastruktur Jalan dan Jembatan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si Selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“Dengan adanya pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat kami. Yang dimana membuat mobilisasi warga menjadi lebih lancar, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi lebih mudah, dan harga kebutuhan pokok menjadi lebih murah. Bahkan membuka lapangan kerja baru seperti jasa transportasi/trevel”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan memberi dampak yang sangat besar yang dirasakan masyarakat dalam mengakses kebutuhannya seperti Pusat Kecamatan, pasar, Layanan Pemerintah, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Serta Transportasi barang dan hasil pertanian menjadi lebih lancar, serta mempermudah bagi pelaku-pelaku usaha untuk berbelanja atau mendagangkan usahanya, hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat yang berfofesi sebagai petani dalam menjual hasil panenya ke daerah/desa lain”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan membawa perubahan besar bagi warga atau masyarakat Desa Long Nawang terutama dalam hal akses dan mobilitas Masyarakat tidak lagi terisolasi karna perjalanan lebih cepat, sehingga kebutuhan pokok, pendidikan dan layanan kesehatan lebih muda didapat. Dan ini juga turut membantu masyarakat perbatasan untuk menjual hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan adat di luar desa. Dengan terbukanya akses juga masyarakat lebih mudah untuk berinteraksi dengan keluarga atau kerabat di desa lain. Tapi beliau juga mengingatkan terutama untuk anak mudah desa Long Nawang,

karna dengan terbukanya akses mempermudah juga masuknya hal-hal negatif, seperti minuman keras dan obat terlarang atau hal lain yang bisa merusak generasi muda”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sangat terasa manfaatnya bagi kami diperbatasan, terutama pada transportasi menjadi lebih lancar yang dimana sebelumnya jika ingin keluar desa atau berkunjung ke desa tetangga makan waktu yang lama dan sulit. Ini juga mempermudah membawa hasil kebun, bahan bangunan, dan kebutuhan sehari-hari. Lanjutnya Dengan menjadi lebih baiknya jalan dan jembatan pedagang dari luar bisa masuk, dan warga juga bisa menjual hasil pertanian ke daerah/desa lain, tentu juga harga barang kebutuhan pokok lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya.”(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan oleh Pemerintah sangat terasa terutama dalam hal seperti, mobilitas masyarakat menjadi lancar, untuk distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian jauh lebih cepat dan murah, serta akses layanan kesehatan maupun pendidikan yang bisa dengan mudah dijangkau Masyarakat”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Mengatakan bahwa dengan adanya Pembanguana Infrastruktur Jalan dan Jembatan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan seperti Long Nawang merasakan dampak yang sangat signifikan seperti lebih muda keluar masuk desa. Distribusi bahan bangunan, kebutuhan pokok, dan hasil pertanian lebih muda dan cepat sehingga harga barang menjadi lebih murah dan terjangkau, serta akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan jauh lebih muda karena anak-anak sekolah dan pasien rujukan tidak lagi terhambat oleh jarak dan medan yang berat. Lanjutnya dengan adanya pembangagunan jalan dan jembatan juga menjadi pemicu untuk pembangunan lain seperti, jaringan listrik(PLN), Telekomunikasi, dan fasilitas umum”.(Wawancara 3 Juli 2025)

### 4.2.3. Pembangunan Infrastruktur Perkantoran

- a. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/ menyusun perencanaan pembangunan Infrastruktur Perkantoran?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“Ada perencanaan yang disusun baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di tingkat nasional Menurut saya, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan telah diatur melalui kebijakan seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan, serta Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Lewat regulasi ini, pembangunan perkantoran, fasilitas layanan publik, pos perbatasan, hingga kantor kecamatan masuk dalam perencanaan terpadu antara pusat dan daerah”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“pemerintah daerah dan pemerintah pusat memang membuat perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, termasuk perkantoran, di wilayah perbatasan. Perencanaan ini biasanya disusun dalam RPJMN di tingkat nasional dan RPJMD di tingkat daerah. Menurut laporan hasil kunjungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah ada program prioritas untuk memperkuat kawasan perbatasan. Sementara pemerintah kabupaten menyusun perencanaan detail sesuai kondisi lapangan, termasuk kebutuhan kantor desa, kantor kecamatan, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya”.( Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Iba selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Setahu kami yang ada di wilayah perbatasan, pemerintah daerah dan pusat memang membuat perencanaan untuk membangun infrastruktur pelayanan publik di wilayah perbatasan, termasuk kantor pemerintahan. Hal ini sudah sering disosialisasikan melalui rapat-rapat bersama pemerintah kabupaten atau kunjungan-kunjungan dari para pemimpin dan pengurus pemerintah daerah ataupun pusat. Lanjutnya kami juga melihat langsung ada upaya serius dari pemerintah, misalnya membangun kantor camat, kantor desa, dan pos pelayanan masyarakat agar

pelayanan lebih dekat dan mudah diakses oleh warga. karena wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus Negara”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Sejauh yang kami/masyarakat tahu, pemerintah daerah dan pusat memang sudah membuat perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik di wilayah perbatasan. Beliau mengatakan sering mendengar informasi tentang program pembangunan yang masuk dalam rencana nasional maupun daerah, termasuk kantor camat, kantor desa, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya ”. (Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Menurut Informasi pada saat melakukan (musrenbang) pemerintah daerah dan pemerintah pusat memang memiliki perencanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, seperti perkantoran, di wilayah perbatasan. Hal ini biasanya ada dalam RPJMN di tingkat pusat dan RPJMD di tingkat daerah”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“pemerintah daerah maupun pusat memang menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, termasuk perkantoran, di wilayah perbatasan. Perencanaan ini biasanya terintegrasi melalui dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di tingkat pusat dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di tingkat kabupaten/provinsi. Di tingkat desa, kami ikut menyampaikan usulan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa, kemudian diteruskan ke kecamatan hingga kabupaten. Beberapa prioritas yang masuk dalam perencanaan adalah pembangunan kantor camat, perbaikan kantor desa, serta fasilitas pelayanan terpadu agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan”.(Wawancara 3 Juli 2025)

- b. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah Pembangunan Infrastruktur Perkantoran yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Wilayah perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“pembangunan infrastruktur pelayanan publik seperti perkantoran di wilayah perbatasan sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun untuk saat ini belum sepenuhnya memadai. Untuk pembangunannya sendiri ada beberapa kantor pemerintahan, seperti kantor camat, pos pelayanan terpadu, kantor desa dan kantor daerah yang sudah dibangun atau direhabilitasi. Tentunya hal ini sangat penting dalam membantu memberikan layanan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan ke ibu kota Kabupaten.”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Kalau kita lihat saat ini, pembangunan infrastruktur perkantoran di wilayah perbatasan memang sudah ada, tapi saya harus jujur bahwa belum sepenuhnya memadai. Ada kantor desa dan kantor camat, namun beberapa fasilitas pendukung masih kurang seperti, kekurangan peralatan kerja dan koneksi internet yang masih belum stabil, dan jumlah tenaga pelayanan yang memadai masih terbatas. Untuk masyarakat sendiri sekarang merasakan pelayanan administrasi lebih dekat, tidak perlu selalu ke ibu kota kabupaten untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, atau surat-surat lainnya. Dan masyarakat merasa bahwa pemerintah hadir dan memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Jika dibanding kan dengan yang dulu pembangunan infrastruktur perkantoran sudah membawa banyak manfaat terutama dalam hal pelayanan administrasi. Yang sudah ada adalah kantor desa, kantor camat, dan beberapa fasilitas pelayanan, dimana membuat urusan administrasi lebih mudah bagi masyarakat. Karena dulu masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten. Tetapi sayang belum bisa sepenuhnya dalam memberi pelayanan seperti di ibu kota kabupaten, karena menurutnya beberapa kantor masih kurang sarana pendukung pekerjaan belum lengkap/kurang, baik itu dari segi alat ataupun tenaga kerjanya sehingga proses dalam melakukan kegiatan pelayanan administrasi menjadi lebih lama”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pembangunan infrastruktur seperti perkantoran sudah ada, seperti pembangunan kantor desa dan kantor camat. Yang dimana sangat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi tanpa harus jauh-jauh ke kabupaten. Tapi kami sebagai masyarakat juga melihat beberapa kekurangan seperti, ada kantor yang bangunannya sudah ada, tapi peralatannya belum lengkap dan jaringan internet masih sulit yang dimana mungkin terjadi karena mungkin kendala anggaran atau karna kondisi lainnya. Beliau berharap pemerintah lebih serius mempercepat realisasi, karena pelayanan publik yang memadai sangat penting bagi masyarakat di perbatasan agar tidak merasa tertinggal. Selain itu, kami juga berharap agar dalam penyusunan perencanaan, pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“pembangunan infrastruktur perkantoran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat seperti pembangunan kantor desa, kantor Camat dan beberapa fasilitas pelayanan publik sudah dibangun atau diperbaiki, sehingga pelayanan administrasi kepada masyarakat lebih mudah dilakukan. Manfaatnya bagi warga adalah salah satunya tidak perlu lagi ke kabupaten untuk mengurus dokumen-dokumen dasar. Dan dengan kantor yang lebih layak, pekerjaan administrasi jadi lebih tertib. Menurutnya juga masi ada beberapa kekurangan dalama pembangunan ini, misalnya jaringan internet belum stabil dan peralatan kerja masih kurang, dan untuk pemeliharaan infrastruktur belum optimal, sehingga bangunan yang sudah ada bisa cepat rusak jika tidak dirawat. Tetapi dia juga menyebutkan mungkin belum bisa optimal karna memang prosesnya yang masih bertahap dan bergantung pada prioritas anggaran. Beliau juga matakan kunjungan terakhir dari BNPP dan kementrian pada saat peresmian PLBN. Menyebutkan bahwa pembangunan perbatasan sebagai prioritas. Harapan masyarakat pemerintah benar-benar melakukan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat, agar masyarakat perbatasan mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik” .(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Menurutnya pembangunan infrastruktur kantoran tentu akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kantor desa sendiri sudah memiliki bangunan permanen yang layak, begitu juga kantor kecamatan, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan administrasi. Dengan adanya perkantoran, koordinasi program pembangunan di desa lebih lancar. Tapi menurutnya untuk fasilitas pendukung belum lengkap dan ada beberapa kantor pelayanan belum sesuai standar dan membutuhkan perbaikan sarana prasarana”.(Wawancara 3 Juli 2025)

- c. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas Pembangunan Infrastruktur Kantor (Pelayanan Publik)?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“Pembangunan infrastruktur pelayanan publik seperti perkantoran di wilayah perbatasan sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun untuk saat ini belum sepenuhnya memadai. Untuk pembangunan sendiri ada beberapa kantor pemerintahan, seperti kantor camat, pos pelayanan terpadu, kantor desa dan kantor daerah yang sudah dibangun atau direhabilitasi. Tentunya hal ini sangat penting dalam membantu memberikan layanan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan ke ibu kota kabupaten”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Kalau kita lihat saat ini, pembangunan infrastruktur perkantoran di wilayah perbatasan memang sudah ada, tapi saya harus jujur bahwa belum sepenuhnya memadai. Ada kantor desa dan kantor camat, namun beberapa fasilitas pendukung masih kurang seperti, kekurangan peralatan kerja dan koneksi internet yang masih belum stabil, dan jumlah tenaga pelayanan yang memadai masih terbatas. Untuk masyarakat sendiri sekarang merasakan pelayanan administrasi lebih dekat, tidak perlu selalu ke ibu kota kabupaten untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, atau surat-surat lainnya. Dan masyarakat merasa bahwa pemerintah hadir dan memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Iba selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Jika dibanding kan dengan yang dulu pembangunan infrastruktur perkantoran sudah membawa manfaat, tetapi belum sepenuhnya memadai. Lanjutnya sudah ada kantor desa, kantor camat, dan beberapa fasilitas pelayanan, yang membuat urusan administrasi lebih mudah bagi masyarakat. Karena dulu masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten. Beliau mengatakan belum memadai karena Beberapa kantor kurang sarana pendukung seperti alat pendukung pekerjaan belum lengkap/kurang baik itu dari segi alat ataupun tenaga kerjanya”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya Pembangunan kantor pelayanan publik di wilayah perbatasan Kami merasakan banyak perubahan dibanding sebelumnya ketika kantor pemerintahan sulit diakses. Sebelumnya masyarakat harus pergi jauh ke kabupaten untuk mengurus dokumen, sekarang pelayanan sudah ada di kecamatan dan desa, sehingga lebih hemat biaya dan waktu. Dengan adanya kantor pemerintahan, kegiatan masyarakat seperti rapat, pertemuan, dan urusan administrasi jadi lebih teratur. Ekonomi juga lebih bergerak karena ada pegawai dan pelayanan di daerah ini”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Sebelum adanya pembangunan infrastruktur kantor pelayanan publik di wilayah perbatasan kegiatan pelayanan administrasi desa dilakukan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Setelah ada pembangunan kantor yang lebih baik pelayanan dokumen seperti KTP, surat keterangan, dan administrasi lainnya bisa dilakukan lebih nyaman dan efisien. Warga juga merasa lebih diperhatikan oleh negara karena kantor pemerintahan berdiri di wilayah perbatasan, bukan hanya di ibu kota kabupaten. Kantor pelayanan publik juga menjadi pusat kegiatan masyarakat, sehingga memepermuda koordinasi program pembangunan desa”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Mengatakan dengan adanya pembangunan infrastruktur kanto (Pelayanan publik) memberi kemudahan bagi setiap untuk urusan pemrintah atupun dalam memberi pelayanan. Dengan adanya kantor desa dan kantor kecamatan yang layak, masyarakat

tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, atau surat-surat penting lainnya. Kehadiran kantor pemerintah juga menambah rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Juga memberi pelayanan yang cepat dalam hal pengurusan izin usaha, bantuan pemerintah, dan program pembangunan desa. Dan dengan adanya kantor yang memadai, rapat, musyawarah, dan koordinasi program jadi lebih cepat dan efisien”.(Wawancara 3 Juli 2025)

#### 4.2.4. Pembangunan Infrastruktur Sosial

- a. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/ menyusun perencanaan pembangunan Infrastruktur Sosial seperti Sekolah dan Puskesmas di Wilayah perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si Selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan menetapkan program strategis pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan. Hal ini mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara dan kebijakan nasional seperti Inpres No. 1 Tahun 2021 serta Perpres No. 118 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten, menyusun perencanaan teknis melalui RPJMD dan Renstra OPD. Program ini meliputi pembangunan gedung sekolah baru, perbaikan fasilitas yang ada, pembangunan puskesmas pembantu, dan pengadaan tenaga guru serta tenaga kesehatan”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Untuk pendidikan beliau sangat antusias dengan program dari pemerintah tentang desa sarjana yang dimana tujuannya agar semua anak-anak di wilayah perbatasan, khususnya di Desa Long Nawang mendapat pendidikan dari mulai masuk Paun/Tk hingga pergguruan tinggi. Sedangkan kesehatan seperti puskesmas dan fasilitas kesehatan, perencanaan biasanya dibuat dinas Kesehatan Kabupaten yang mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan. Termasuk di dalamnya pembangunan gedung puskesmas, rumah dinas tenaga kesehatan, serta pengadaan alat kesehatan. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya rencana untuk memperluas puskesmas Long Nawang serta menambah tenaga perawat dan peralatan medis”.( Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Beliau mengatakan bahwa sebagai salah satu anggota komite sekolah saya sangat mengitu peran pemerintah kabupaten, daerah dan pusat dalam merencanakan dan membangun serta memajukan pendidikan di wilayah perbatasan Apau Kayan khususnya Desa Long Nawang, salah satunya adalah menambah jumlah guru dan honorer, memperbaiki/membangun fasilitas sekolah, serta membuat program-program yang diperuntukan bagi pendidikan di daerah tertinggal, salah satunya seperti program desa sarjana dan batuan biaya siswa untuk perguruan tinggi. Sedangkan untuk kesehatan(PUSKESMA), ada rencana pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat. Untuk membangun puskesmas yang lebih besar dan lengkap, yang di mana sudah lama mulai dibangun atau dikerjakan sehingga diharapkan bisa selesai tahun ini”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pembangunan infrastruktur sosial terutama tentang pendidikan dan kesehatan, pertama beliau menyoroti tantang pendidikan ada upaya dari pemerintah daerah dan pusat untuk bisa memberi pendidikan yang layak bagi warga perbatasan, dengan membangun dan merehab gedung-gedung sekolah. Serta menambah kebutuhan dalam menjalankan pendidikan seperti peningkatan fasilitas sekolah, menambah tenaga pendidik(guru), serta memberi bantuan beasiswa bagi anak-anak yang bersekolah atau kuliah diluar daerah. Sedangkan untuk kesehatan beliau mengatakan bahwa pemerintah sudah merealisasi rencananya tentang pembangunan gedung puskesmas yang baru, dan diharapkan bisa cepat selesai. Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat juga bekerja sama untuk memobilisasi segala hal yang berkaitan dengan kesehatan. Seperti pengadaan Ambulance, penambahan stok Obat, dan fasilitas kesehatan atau medis”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memang terlibat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan puskesmas. Dari pemerintah pusat, ada program pembangunan yang sudah diatur melalui Perpres tentang percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan juga rencana dari Kementerian Pendidikan serta Kementerian Kesehatan. Pusat

biasanya menetapkan kebijakan, seperti fasilitas, pendanaan melalui APBN. Sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, menyusun rencana melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra OPD. Dan telah merealisasikan sebagian dari rencananya. Seperti pembangunan sekolah dasar, SMP, hingga SMA dan peningkatan fasilitas dan bangunan puskesmas yang sekarang sedang dikerjakan. Karena masuk dalam prioritas daerah, terutama untuk wilayah perbatasan seperti Long Nawang. Maka dihapkan pembangunan baik itu fasilitas pendidikan ataupun kesehatan dapat terus ditingkatkan karena kebutuhan dan jumlah penduduk desa long nawang sendiri terus bertambah”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Beliau menjelaskan Untuk pendidikan, pembangunan sekolah biasanya direncanakan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan juga mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan. Rencana tersebut kemudian dimasukkan ke dalam RPJMD kabupaten dan diusulkan melalui Musrenbang Desa sampai Kabupaten. Untuk kesehatan, pembangunan puskesmas atau peningkatan fasilitas kesehatan direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kementerian Kesehatan. Semua ini disesuaikan dengan program nasional seperti Program Indonesia Sehat. Semua perencanaan ini dilakukan mulai dari masuknya usulan dari warga ke desa, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan kemudian Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan anggaran melalui APBN, sedangkan daerah mengalokasikan APBDnya”.(Wawancara 3 Juli 2025)

- b. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah Pembangunan Infrastruktur Sosial seperti Sekolah dan Puskesmas yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Wilayah perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si Selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa : “Keberadaan sekolah dan puskesmas sangat membantu masyarakat. Terutama anak-anak sekarang lebih mudah bersekolah tanpa harus ke kota. Dan puskesmas juga mempermudah akses layanan kesehatan dasar, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk berobat”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya sekolah dari SD,SMP dan SMA, anak-anak tidak harus lagi ke kota untuk melanjutkan sekolahnya karna sudah ada. Untuk kesehatan Puskesmas dan posyandu sudah ada, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak harus lagi membuang banyak biaya untuk ke kota selama itu masi bisa ditangani oleh tenaga medis yang ada. Tetapi baik itu pendidikan atau kesehatan masi terdapat kendala dalam pelayanannya seperti. Walaupun bangunan sekolah sudah ada, untuk sarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan tenaga guru masih kurang. Dan untuk puskesmas, tenaga medisnya masi terbatas dan peralatan kesehatan belum lengkap serta kekurangan stok obat, sehingga untuk kasus darurat masyarakat tetap harus dirujuk keluar desa/kota”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Pembangunan Infrastruktur Sekolah dan Puskesmas saat ini memang terasa membawa manfaat bagi masyarakat karena dulu untuk mendapatkan pendidikan masyarakat harus ke Kabupaten/kota begitu juga kesehatan. Sekarang setelah adanya Sekolah dan Puskesmas yang memadai anak-anak bisa tetap sekolah di desa dan warga bisa berobat dengan lebih cepat dan murah. Namun, kondisinya masi banyak kekurangan terutama fasilitas pendukung dan jumlah tenaga kerjanya”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya pembangunan Sekolah dari tingkat dasar sampai SMA, sangat membantu anak-anak agar bisa menyelesaikan pendidikan Sekolahnya sampai tamat SMA Ini sangat penting agar generasi muda tetap mendapat pendidikan. Puskesmas juga sangat dirasa manfaatnya karena sebelumnya warga harus menunggu tenaga medis keliling atau pergi jauh untuk berobat. Dengan adanya puskesmas, layanan kesehatan lebih cepat dan dalam keadaan darurat bisa ditangani. Untuk kendalanya sendiri fasilitas sekolah dan puskesmas masih terbatas. Seperti halnya guru yang masi kurang dan fasilitas seperti perpustakaan dan buku pelajaran masi belum ada atau belum cukup, dan di puskesmas sering kekurangan tenaga medis maupun obat-obatan”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Secara umum atau yang dilihat pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan puskesmas di Desa Long Nawang sudah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Anak-anak tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk sekolah. Saat ini, sudah ada sekolah dasar dan menengah di desa, sehingga angka putus sekolah menurun. Dari segi kesehatan ada puskesmas dan posyandu, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Ini tentu sangat membantu, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak. Dulu, masyarakat harus ke Malinau atau Tarakan untuk urusan kesehatan. Sekarang, banyak yang bisa ditangani di desa. Tapi juga belum sepenuhnya memadai seperti fasilitas sekolah masih terbatas, misalnya kurang ruang kelas, laboratorium, dan guru mata pelajaran tertentu. Petugas medis sering terbatas, dan obat-obatan kadang tidak lengkap. Untuk kasus darurat, tetap harus dirujuk kekota. Walaupun sudah ada bangunan.”(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Kalau melihat dari kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan seperti di desa Long Nawang, pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan puskesmas memang sangat penting. Sejauh ini, pembangunan tersebut sudah mulai dilaksanakan, dan memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti sekolah, sekarang anak-anak sudah bisa belajar lebih dekat tanpa harus berjalan jauh atau menyeberang sungai. Pemerintah sudah membangun sekolah dasar sampai SMA, dan ada juga rencana untuk peningkatan fasilitas sekolah. Ini sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di desa kami. Untuk puskesmas atau fasilitas kesehatan, sudah ada pembangunan puskesmas dan posyandu di desa. Ini sangat membantu dalam penanganan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan pengobatan penyakit ringan. Namun, untuk kasus darurat atau penyakit berat, warga tetap harus dirujuk ke rumah sakit di kabupaten. Menurutnya secara umum sudah banyak bermanfaat yang dirasakan masyarakat semenjang adanya Pembangunan Infrastruktur pendidikan dan kesehatan tetapi masih belum sepenuhnya cukup karna masi banyak kendala seperti peningkatan sarana, seperti tenaga medis tambahan, fasilitas rawat inap, dan peralatan kesehatan yang lebih lengkap. Begitu juga untuk sekolah, masih dibutuhkan guru tambahan dan ruang kelas yang layak, agar pendidikan bisa merata.”(Wawancara 3 Juli 2025)

- c. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas Pembangunan Infrastruktur Kantor (Pelayanan Publik)?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si Selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa:

“Dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan puskesmas cukup besar. Pertama, dari sisi pendidikan, masyarakat kini lebih mudah mengakses fasilitas sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah meningkat. dari sisi kesehatan, keberadaan puskesmas dan posyandu sangat membantu pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan penanganan penyakit umum. Hal ini berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kesadaran kesehatan karna puskesmas rutin memberi penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Dampak pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan fasilitas kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya sekolah yang layak, anak-anak di wilayah perbatasan dapat menempuh pendidikan tanpa harus pergi jauh, sehingga angka putus sekolah menurun. Selain itu, kualitas pendidikan juga meningkat karena adanya sarana prasarana yang lebih baik. Di bidang kesehatan, dengan adanya peningkatan puskesmas dan posyandu yang lebih lengkap mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama ibu hamil, balita, dan lansia. Dimana dulu masyarakat harus kota atau kabupaten untuk berobat. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat.”(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan fasilitas kesehatan membawa banyak dampak bagi masyarakat perbatasan. Seperti akses pendidikan menjadi lebih mudah sehingga anak-anak tidak perlu pergi lagi ke kota, ini membantu meningkatkan kualitas SDM dan menjaga mereka tetap tinggal di kampung. Kedua, adanya puskesmas atau fasilitas kesehatan membuat pelayanan kesehatan lebih dekat, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang untuk berobat”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Menurut kami, pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan puskesmas sangat bermanfaat bagi masyarakat perbatasan. Di bidang pendidikan, anak-anak tidak perlu lagi meninggalkan kampung/desa untuk bersekolah, sehingga angka putus sekolah menurun dan kesadaran pentingnya pendidikan semakin meningkat. Di bidang kesehatan, keberadaan puskesmas mempermudah akses layanan, khususnya untuk ibu hamil, balita, dan warga yang sakit, dan lansia. Dampak lainnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“pembangunan infrastruktur sosial di bidang pendidikan dan kesehatan memberikan dampak positif bagi masyarakat perbatasan. Keberadaan sekolah memudahkan anak-anak untuk mengakses pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan jauh, sehingga angka partisipasi sekolah meningkat. Di sisi lain, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan keberadaan tenaga medis memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dasar, termasuk imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan pengobatan penyakit ringan. Secara umum, kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, serta kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan meningkat”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Pembangunan infrastruktur sosial, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat perbatasan. Di sektor pendidikan, hadirnya sekolah mempermudah anak-anak untuk bersekolah di wilayah sendiri, sehingga mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM desa. Sementara di bidang kesehatan, keberadaan puskesmas dan posyandu membuat masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar, menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, dampak ekonomi warga juga

tererbantu akibat adanya tenaga guru dan medis di desa”.(Wawancara 3 Juli 2025)

#### **4.2.5. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi**

- a. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/ menyusun perencanaan pembangunan Infrastruktur pasar dan bank di Wilayah perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si Selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“Untuk infrastruktur ekonomi khusus seperti pasar atau perbankan, atas permintaan dari masyarakat pemerintah daerah dan pusat sudah membuat perencanaan pembangunan yang kemudian diserahkan ke kabupaten untuk merealisasinya dan sekarang sudah dibangun dan digunakan. Khususnya untuk perbankan pemerintah pusat maupun daerah melakukan kerja sama dengan bank nasional agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi. Jadi, meskipun saat ini prioritasnya masih pada akses jalan dan konektivitas, pembangunan sarana ekonomi tetap menjadi bagian dari rencana pengembangan wilayah perbatasan ke depan”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Tentu karna sekarang di wilayah desa long nawang sendiri memiliki yaitu Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang dibuat oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintahan Provinsi Kaltara yang kemudian diserahkan ke kabupaten malinau untuk membangunnya. Sedangkan untuk pasar yang ada sekarang adalah hasil inisiatif dari Desa dan Kecamatan atas usulan warga, yang kemudian dibangun dengan APBD malinau”.( Wawancara 25-28 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa: “Pemerintah pusat dan daerah sudah beberapa kali membicarakan tentang pengembangan ekonomi. Namun, yang baru dilakukan hanya pembangunan pasar sederhana. Kalau untuk Bank sudah ada, dan sudah aktif melayani masyarakat mulai dari tahun 2018 sampai sekarang”.(Wawancara 25-27 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :  
 “Saat ini pasar desa sudah ada, tetapi kondisinya masih sederhana dan memerlukan peningkatan fasilitas agar layak digunakan. Untuk bank atau layanan keuangan, sampai sekarang sudah tersedia di desa yaitu Bank (BPD) dan sudah melayani transaksi perbankan”. (Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Untuk pembangunan pasar, sudah ada pembahasan dan sebagian sudah dilaksanakan dalam bentuk pasar desa, namun belum sepenuhnya memadai karena keterbatasan fasilitas dan akses transportasi. Kami juga mendapat informasi bahwa pasar permanen akan direncanakan ke depan agar masyarakat memiliki pusat perdagangan yang layak. Sementara untuk fasilitas perbankan, sudah ada Bank (BPD) yang dibangun oleh pemerintah walupun diperuntukan untuk Kecamatan Kayan Hulu. Tapi berada di dalam wilayah desa Long Nawang”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat memang sudah menyusun rencana pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk pasar dan bank termasuk fasilitas pendukung. Namun, pelaksanaannya masih bertahap karena terkendala akses, anggaran, dan prioritas program. Seperti sekarang pasar yang ada baru pasar desa dan Bank memang sudah ada namun bangunannya masi perlu ditingkatkan karna banyaknya jumlah nasabah”.(Wawancara 3 Juli 2025)

- b. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah Pembangunan Infrastruktur Pasar dan Bank yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Wilayah perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan bank yang telah dilaksanakan di wilayah perbatasan harusnya sangat berguna bagi masyarakat. Seperti pasar memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli dan mencari bahan sembako.

Namun masih terdapat beberapa kekurangan, terutama terkait fasilitasnya dan hanya dibuka pada hari-hari tertentu saja. Untuk bank tentu sangat membantu masyarakat dalam transaksi keuangan, pengiriman uang, dan mendukung usaha kecil. Meskipun demikian, perlu ditingkatkan lagi jangkauan layanan perbankan serta pemahaman masyarakat terkait kegiatan dalam perbankan. Jadi menang sangat dirasa manfaatnya, tetapi juga masih memerlukan pengembangan agar lebih memadai dan merata”.(Wawancara 25-28 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, dengan adanya pasar membuat masyarakat dalam hal menjual hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi lebih mudah dan menghemat waktu karena tidak perlu lagi keliling dari rumah-kerumah. Sedangkan adanya bank juga membantu dalam transaksi keuangan, tabungan, dan mendukung usaha kecil masyarakat. Namun, untuk ketersediaan dan fasilitas, masih ada kekurangan. Pasar yang ada belum sepenuhnya layak baik dari sisi bangunan maupun sarana pendukung, sementara bank masih terbatas untuk fasilitas terutama pada pelayanannya yang dimana sering terjadi antrian yang panjang pada hari-hari tertentu”.(Wawancara 25-27 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Adanya Pasar mempermudah masyarakat untuk bertransaksi jual beli sembako atau kebutuhan sehari-hari juga mempermudah dan meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan keberadaan bank membuat masyarakat lebih muda untuk penyimpanan/menabung, menarik gaji serta akses permodalan bagi usaha kecil, yang dimana sebelumnya semua aktifitas perbankan masyarakat harus ke kota atau kabupaten. Namun untuk sekarang masih perlu adanya peningkatan/perbaikan, seperti perbaikan fasilitas pasar agar lebih lengkap dan tidak hanya dibuka pada waktu tertentu saja, perbankan, terutama terkait Pelayanan yang masih kurang dan fasilitas terutama bangunan yang masih kecil jadi terbatas yang bisa masuk, bergantian masuk pada saat lagi banyak pengunjung/nasabah”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan bank sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat di wilayah

perbatasan. Namun, saat ini masih belum sepenuhnya memadai. Pasar yang ada memang membantu masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, tetapi fasilitasnya masih sederhana dan belum dikelola secara maksimal. Untuk bank, sangat dibutuhkan karena akses ke layanan keuangan masih sulit. Jika fasilitas ini dilengkapi dan dikelola dengan baik, tentu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, mengurangi ketergantungan ke luar daerah, dan memperkuat posisi ekonomi di perbatasan”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“infrastruktur ekonomi seperti pasar dan bank yang telah dilaksanakan di wilayah perbatasan memang memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Kehadiran pasar memudahkan warga dalam melakukan aktivitas jual beli, sedangkan bank membantu dalam akses layanan keuangan. Namun, jika dilihat dari segi ketersediaan dan kualitas, fasilitas ini masih terbatas. Misalnya, sarana pasar belum lengkap dan hanya dibuka 1 kali seminggu atau pada saat hari-tertentu saja dan bank belum mampu menyediakan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat, karena masi terbatas untuk sarana dan prasarana yang ada. Diharapkan untuk ke depannya ada pengembangan lebih lanjut agar manfaatnya lebih optimal dan benar-benar dapat mendukung perekonomian masyarakat perbatasan.”(Wawancara 3 Juli 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan bank yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pasar, masyarakat untuk melakukan jual beli hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari, sehingga perputaran ekonomi meningkat. Kehadiran bank juga membantu masyarakat mengakses layanan keuangan, menabung, dan memperoleh modal usaha. Namun, kami menilai sarana dan prasarana yang ada masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kapasitas maupun fasilitas pendukung agar dapat melayani masyarakat dengan lebih optimal, mengingat wilayah perbatasan memiliki tantangan jarak dan waktu.”(Wawancara 3 Juli 2025)

- c. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas Pembangunan Infrastruktur Ekonomi ( Pasar dan Bank)?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa:

“Masyarakat lebih mudah melakukan transaksi jual-beli karena pasar tersedia, sehingga produk pertanian, hasil hutan, dan kerajinan bisa dipasarkan dengan baik. Dengan adanya pasar, daya jual produk lokal meningkat, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk membuka usaha kecil menengah (UMKM). Kehadiran bank mempermudah masyarakat untuk menabung, melakukan pinjaman modal usaha, dan mengurangi tidak lagi harus pergi jauh ke kota hanya untuk menabung atau mengurus gaji (bagi ASN dan Karyawan Swasta)”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan bank memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat perbatasan. Beberapa dampak yang dirasakan adalah. Dengan adanya pasar, masyarakat lebih mudah menjual hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Hal ini meningkatkan pendapatan warga dan perputaran ekonomi desa. Kehadiran bank membantu masyarakat dalam menabung, meminjam modal usaha, dan melakukan transaksi keuangan tanpa harus ke kota besar. Juga membantu pengembangan usaha kecil menengah di perbatasan. Pembangunan pasar dan bank juga menciptakan peluang kerja baru, seperti pedagang, pegawai, maupun jasa pendukung (transportasi, logistik, dll.). Sebelumnya masyarakat harus ke kota untuk jual-beli atau transaksi keuangan, tetapi kini kebutuhan bisa dipenuhi di desa”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan bank memberikan dampak positif yang bagi masyarakat perbatasan. Seperti pasar, mempermudah warga dalam menjual hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan tanpa harus berkeliling desa atau keluar kota. Mengenai bank membantu masyarakat memperoleh akses layanan keuangan, seperti menabung, mengirim uang, dan meminjam modal untuk usaha. Dampak ini mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di desa. Namun, Kepala Adat juga menekankan pentingnya pendampingan agar masyarakat mengerti bagaimana sistem perbankan itu dijalankan”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Menurutnya, pembangunan pasar dan bank di wilayah perbatasan sangat membantu masyarakat. Sekarang kami lebih mudah menjual hasil kebun, dan tidak perlu jauh ke kota untuk urusan perbankan. Ekonomi mulai berkembang, banyak warga yang buka tokoh/usaha kecil. Tapi sebagian masyarakat masih belum paham cara pakai layanan bank, jadi perlu pendampingan”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Dampaknya cukup besar bagi masyarakat kami. Dengan adanya pasar, warga bisa menjual hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan tanpa harus keluar desa. Untuk bank, dampaknya juga positif. Masyarakat sekarang lebih mudah menabung, mengambil pinjaman untuk usaha, dan melakukan transaksi perbankan. Ini juga berdampak terhadap transaksi penukaran uang mata uang dari pRupiah-Ringgit atau pun sebaliknya, karena sebelumnya masyarakat kesusahan menukar uang Ringgit Malaysia”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Menurutnya dampak pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan bank di wilayah perbatasan ini cukup besar bagi masyarakat. Dengan adanya pasar, masyarakat jadi lebih mudah menjual hasil kebun dan membeli kebutuhan. Sementara untuk bank terasa sangat membantu karena sekarang masyarakat bisa menabung dan aktifitas seperti mentransfer atau menarik yang dulu hanya bisa dilakukan dikota sekarang sudah bisa dan mengambil pinjaman untuk usaha. Namun katanya ada juga tantangan baru seperti persaingan usaha yang makin ketat dan perubahan pola belanja masyarakat. Tapi secara umum, manfaatnya lebih banyak dan sangat membantu perekonomian desa”.(3 Juli 2025)

#### **4.2.6. Pembangunan Infrastruktur Produksi**

- a. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/ menyusun perencanaan pembangunan Infrastruktur Produksi di Wilayah perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informen* dan *Informen* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si Selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“infrastruktur produksi di wilayah perbatasan untuk saat berfokus pada penyediaan listrik melalui PLN dan penyediaan air bersih melalui PDAM. Dari pemerintah pusat dan daerah sendiri suda membangun pembangunan PLN dan PDAM, dan sudah beroperasi dan digunakan masyarakat Apau kayan. Untuk desa Long nawang sendiri, pemasangan dan penggunaan listrik dari PLN sudah mencakup seluruh desa, sedangkan untuk air bersih (PDAM) hanya tersisa 1 RT yang belum dapat pemasangan pipi untuk air bersih. Sedangkan sarana prasaran yang lain masi dalam tahap perencanaan dan ada juga yang sudah dilakukan seperti pembangunan dan pengadaan Tower/Telekomunikas, Jalan Tani, Alat Pertanian, tepi masi dilakukan secara bertahap dan terbatas untuk diakses masyarakat”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“untuk wilayah perbatasan seperti Long Nawang, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan anggaran, sulitnya akses transportasi, serta kondisi geografis yang cukup menantang. Saat ini sebagian besar perencanaan masih berada pada tahap koordinasi dan pengusulan, sementara realisasi penuhnya belum dilaksanakan karna akan bertahap pelaksanaanya. Untuk sekarang yang diprioritaskan oleh pemerintah yaitu pembangunan PLN dan PDAM yang dimana suda dibangun dan digunakan”.( Wawancara 25-28 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“perencanaan pembangunan infrastruktur produksi terutama yang menjadi prioritas pemerintah adalah listrik (PLN) dan air bersih (PDAM) yang berdasarkan usulan dan permintaan warga, Untuk perencanaan sendiri sudah direncana oleh pemerintah daerah dan pusat sejak tahun 2009 dan mulai dikerjakan pada sekitar tahun 2010 dan baru sudah terealisasi ditahun 2020”.(Wawancara 25-27 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Pemerintah pusat dan daerah sudah menyediakan listrik melalui PLN dan jaringan air bersih melalui PDAM. Namun, untuk pelaksanaan masih bertahap karena terkendala kondisi geografis dan biaya yang cukup besar. Meski demikian, program ini sudah dijalankan dan diawasi langsung oleh pemerintah daerah”. (Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“pemerintah daerah dan pemerintah pusat terlibat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur produksi seperti PLN dan PDAM. Perencanaan tersebut dilakukan melalui program strategis pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk penyediaan listrik dan air bersih”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Menurutnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat lah yang merancang dan menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur produksi seperti PLN dan PDAM, tapi semua harus mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan mempertimbangkan apa yang masyarakat minta dan usulkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan, termasuk Desa Long Nawang”.(Wawancara 3 Juli 2025)

- b. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah Pembangunan Infrastruktur Pasar dan Bank yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Wilayah perbatasan?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informen* dan *Informen* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa :

“pembangunan infrastruktur produksi seperti PLN dan PDAM yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Keberadaan listrik dari PLN membantu meningkatkan aktivitas ekonomi, penerangan, serta mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, PDAM menyediakan akses air bersih yang sangat penting bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, untuk listrik (PLN) hanya menyala 12 jam saja dari jam 6 sore - jam 6 pagi. belum bisa menyala 24 jam, karena terkendala minyak (BBM) yang terbatas dan walaupun ada dan siap dikirim masi, terkendala dengan transportasi pengiriman atau pengangkutanya. Dan untuk PDAM sendiri untuk sekarang masi ada beberapa kelompok atau rumah warga yang belum tercover karna kondisi air penampung PDAM sendiri masi kurang, jadi pemerintah desa bersama warga mengambil inisiatif untuk membuat dum sendiri untuk menyuplai air ke rumah warga yang tidak tercover oleh PDAM”.(Wawancara 25-28 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya PLN dan PDAM penerangan pada malam hari menjadi lebih baik dan untuk melakukan aktifitas pada malam hari pun menjadi lebih muda. Sedangkan untuk PDAM masyarakat tidak lagi mengambil air secara langsung disungai. Namun menurutnya, masih terdapat beberapa masalah seperti, listrik (PLN) belum bisa menyalah 24 jam dan air bersih (PDAM) masih belum maksimal karena dipakai 2 desa Long Nawang dan Nawang Baru, jadi pada saat musim kemarau air tidak bisa mengalir terutama ke desa Long Nawang karena jaraknya dari penampungan air lebih jauh dari pada desa Nawang Baru dan terkadang sudah habis dipenampungan oleh Desa Nawang Baru, serta masih terdapat beberapa rumah yang belum mendapat pemasangan keran dan pipa air dari PDAM. Ada juga keluhan dari beberapa warga yang mengerti tentang pentingnya air bersih karena dari pihak PDAM sudah tidak memakai/menggunakan klorin untuk menjernihkan air dan obat khusus untuk membunuh bakteri dan kuman yang biasa dipakai PDAM di kota, sempat dipakai hanya saja cuma 2 tahun pertama PDAM beroperasi dan sekarang sudah tidak lagi. jadi sekarang warga memakai air yang sama dengan yang ada disungai”.(Wawancara 25-27 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Iba selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Semenjak Masuknya dan mulai beroperasinya PLN dan PDAM aktifitas warga menjadi lebih lancar terutama yang menggunakan listrik/air, seperti aktifitas pertukangan memakai mesin bor dan ketam yang membutuhkan daya besar, atau kesehatan(puskesmas) yang harus siap beroperasi 24 jam. Sedangkan air diperlukan hampir setiap hari jadi dulu setiap sore atau malam warga biasanya mengambil atau menyedot air dari sungai, yang tentunya memakan banyak waktu sehingga aktifitas lain jadi terganggu. Tapi setelah masuknya PLN dan PDAM semua hal tersebut bisa dengan mudah dilakukan, dan lebih menghemat waktu untuk pengerjaannya. Sayangnya, menurut beliau PLN hanya menyalah pada malam hari jadi pada saat siang hari masyarakat masih tetap menggunakan genset dan ada juga yang menggunakan tenaga surya (solarcer) untuk memenuhi kebutuhan akan listrik pada saat siang hari, karena aktifitas warga lebih banyak dilakukan pada siang hari dari pada malam dan juga pasokan bahan bakarnya(BBM) masih sering terhambat pengirimannya, sehingga terkadang pada saat stok BBM untuk mesin PLN belum ada, listrik bisa hanya bisa menyala 7-9 jam saja tergantung sisa bahan bakar yang ada. Juga untuk air

bersih (PDAM) masih sering mati/tidak mengalir dan terkadang mengalirnya hanya pada saat jam-jam tertentu saja, dan masi ada sebagian rumah yang belum mendapat pemasangan pipa dan keran air”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Adanya Pembangunan Infrastruktur Produksi terutama Listrik (PLN) dan Air Bersih (PDAM) sangat baik dan terasa manfaatnya dalam hal untuk beraktifitas malah hari menjadi lebih nyaman terutama pada saat acara keagamaan atau beribadah pada malah hari jadi tidak terganggu karna lampu yang kurang terang, alat yang bisa digunakan untuk kelancara acara atau ibadah juga jadi lebih banyak, beliau juga mengatakan karna kebutuhan akan listrik masyarakat sebelumnya masi menggunakan mesin disel yang disediakan oleh pemerintah Desa, karna aliran listriknya tidak stabil tiba-tiba naik atau turun, sering mengakibatkan alat-alat elektronik/ yang menggunakan listrik terbakar tapi sekarang sudah tidak lagi karna sudah ada PLN yang aliran listriknya lebih stabil. Sedangkan untuk PDAM sekarang warga lebih mudah untuk mengakses air bersih dan jika ada acara tertentu, masyarakat/warga tidak lagi kalang kabut untuk mengambil atau menyedot air dari sungai karena sudah ada air yang mengalir dari keran yang sudah dipasang PDAM jadi menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan, terutama untuk warga yang rumahnya di atas gunung atau jauh dari sungai. Tapi menurut beliau keluhan warga/masyarakat tentang PLN dan PDAM masi banyak terutama PLN belum biasa aktif 24 jam dan petugas masi sedikit hanya ada 3 orang jadi saat terjadi masalah seperti, konslet, kabel putus atau skring yang terbakar petugas dari PLN tidak bisa langsung datang/penaganannya lambat karena banyaknya warga/masyarakat yang harus dilayani jadi bergantian. Untuk air bersih (PDAM) beliau berharap adanya mesin pemompa dan penyedot air yang digunakan PDAM kecamatan Kayan Hulu agar air bisa tetap lancar mengalir walupun dimusim kemaru, karna untuk PDAM yang ada sekarang untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga dan untuk menampung air hanya mengandalkan aliran sungai yang deras dan tempat yang tinggi. Dan masih ada masalah seperti pemasangan keran atau pipa yang belum merata, air yang kadang keru, dan pelayanan yang masi lambat jika terjadi masalah pada keran atau meteran airnya”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Untuk PLN Bilau menjelas kan walau pun hanya menyalah 12 jam saja tapi aliran listriknya lebih setabil dan setidaknya penerangan tetap maksimal pada malam hari, karna sebelum adanya listrik dari PLN, untuk kebutuhan listrik sebelumnya menggunakan mesin disel yang disediakan oleh desa dan hanya menyala maksimal 6 jam saja mulai dari jam 7 malam sampai jam 10/11 saja. Jika ada aktifitas diatas jam tersebut warga kebanyakan menggunakan mesin pribadi seperti genset/solacer yang diisi pada siang harinya. Jika menyangkut kebutuhan akan air bersih, dengan adanya PDAM sekarang setiap warga atau rumah bisa lebih mudah untuk mengakses air bersih. Cuma menurutnya masi terdapat masalah seperti listrik yang seharusnya bisa 24 jam hanya menyala 12 jam karna ketersediaan bahan bakarnya yang sedikit, karena untuk menyetok bahan bakar minyak (BBM) masi terkendala akses dan perjalanan yang jauh, dan itupun tidak bisa membawa banyak. Kalau PDAM sarana dan prasaranya belum lengkap, seperti mesing penyedot dan pemompa, Obat pejerni dan pembunuh kuman atau bakteri dalam air tidak tersedia, pipa yang sering bocor dan pelayanan yang sering terlambat dan tidak maksimal, masi ada juga sebagian kelompok atau rumah warga yang belum mendapat pemasangan baik itu keran atau pipa air dari PDAM. Beliau berharap untuk kedepanya agar pemerintah bisa secara bertahap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masi terjadi, baik itu PLN dan PDAM ataupun masalah infrastruktur lainnya”.(Wawancara 3 Juli 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Menurutnya pembangunan infrastruktur produksi seperti PLN dan PDAM yang dilaksanakan memang memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Kehadiran listrik dari PLN mempermudah aktivitas warga, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha produktif. Begitu juga dengan PDAM, meskipun kapasitasnya masih terbatas, penyediaan air bersih sangat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, masi ada beberapa masalah seperti PLN yang masi kekurangan bahan bakar minyak(BBM) yang menyebabkan listrik hanya tersedia pada siang hari saja atau tengah kerjanya masi sedikit yang menyebabkan pelayanannya tidak maksimal. Lanjutnya PDAM masi terkendala dengan sarana prasaranya terutama masih belum adanya mesin penyedot dan pemompa air sehingga aliran air ke rumah warga yang jau atau yang tinggal digunung tidak maksimal aliran airnya tidak deras dan juga kadang terjadi air tidak menggali karna air yang ada dipenampungan milik PDAM habis, dan masi terdapat warga yang belum bisa menikmati air bersih karena belum ada pemasangan baik itu pipa atau keran air

daru PDAM. Untuk ke depan perlu adanya peningkatan kualitas dan cakupan layanan agar lebih memadai dan menjangkau seluruh wilayah desa”.(Wawancara 3 Juli 2025)

C. Menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara, Apakah dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas Pembangunan Infrastruktur Produksi (PLN dan PDAM) ?

Hasil wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* yaitu Bapak Setim Ala, SE, M.Si selaku Camat Kayan Hulu Mengatakan Bahwa:

“Pembangunan infrastruktur seperti PLN dan PDAM memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat kami di perbatasan. Dengan adanya listrik, kehidupan warga menjadi lebih mudah. Sekarang mereka bisa beraktivitas di malam hari, anak-anak bisa belajar dengan penerangan yang cukup, dan akses informasi juga lebih lancar karena bisa menggunakan televisi dan internet. Selain itu, adanya air bersih dari PDAM sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari, mengurangi penyakit akibat air tidak layak, dan mendukung usaha kecil seperti warung dan pengolahan hasil pertanian. Kehadiran listrik juga membuka peluang usaha baru”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukas Bilung selaku Kepala Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“pembangunan infrastruktur produksi seperti PLN dan PDAM memberikan dampak yang cukup besar untuk masyarakat perbatasan. Beberapa seperti dengan adanya listrik dan air bersih mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah seperti warung, penggilingan padi, serta usaha berbasis jasa. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dan kini Masyarakat memiliki akses terhadap air bersih dari PDAM, sehingga kesehatan meningkat dan risiko penyakit berkurang. Selain itu, listrik juga mendukung penggunaan alat elektronik seperti kulkas dan televisi. Adanya listrik juga mempermudah anak-anak belajar di malam hari dengan penerangan yang cukup. Selain itu, akses internet menjadi lebih mudah karena perangkat komunikasi dapat diisi daya”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau selaku Kepala Adat Kecamatan dan Desa Long Nawang mengatakan bahwa:

“Pembangunan PLN dan PDAM sangat berdampak bagi masyarakat. Karena dengan adanya listrik dari PLN, warga sekarang bisa menggunakan peralatan elektronik seperti kulkas,

mesin cuci, dan aliran listrik lebih stabil, Dan proses belajar pada malam hari menjadi lebih baik karena penerangan yang baik. Untuk PDAM, masyarakat kini lebih mudah mendapatkan air bersih yang aman untuk dijadikan air minum, sehingga kesehatan lebih terjamin dan juga tidak harus lagi jauh-jauh ke sungai saat mau mandi atau mencuci pakaian”.(Wawancara 25 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pdt. Surang Bira Selaku salah satu Toko Masyarakat Desa Long Nawang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya listrik dari PLN, masyarakat dapat menikmati penerangan di malam hari, menggunakan peralatan rumah tangga, serta mendukung aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. Selain itu, keberadaan listrik juga membuka peluang usaha baru seperti bengkel, salon, jasa seperti foto copy/print dan usaha penyediaan vocer wifi yang sebelumnya sulit dijalankan karena keterbatasan energi. Di sisi lain, PDAM memberikan kemudahan dalam akses air bersih. Sebelum ada PDAM, masyarakat biasanya mengambil air dari sungai atau sumur yang kualitasnya kurang terjamin. Kini, dengan adanya saluran air bersih, waktu pengambilan air menjadi lebih efisien dan kesehatan masyarakat lebih terjaga karena risiko penyakit yang berasal dari air kotor berkurang”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. selaku Sekertaris Desa Long Nawang (sekdes), mengatakan bahwa :

“Dampaknya cukup besar bagi masyarakat. Sekarang warga bisa menikmati listrik dengan lebih stabil. Ini mempermudah aktivitas sehari-hari seperti penerangan, menonton TV, mengisi daya HP, hingga menggunakan peralatan rumah tangga. dampak terhadap pendidikan dan kesehatan juga sangat terasa. Anak-anak bisa belajar di malam hari karena ada penerangan. Puskesmas juga terbantu karena bisa mengoperasikan peralatan medis yang memerlukan listrik. Air bersih dari PDAM juga membantu menjaga kesehatan warga. PLN mendukung munculnya usaha kecil, seperti warung makan, usaha pemberi jasa, dan bengkel, karena mereka memerlukan listrik. Sementara PDAM mendukung aktivitas usaha yang membutuhkan air bersih, misalnya rumah makan dan pengolahan bahan pangan”.(Wawancara 26 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE selaku Kaur Perencanaan Desa Long Nawang sebagai berikut:

“Bilau mengatakan bahwa Pembangunan Infrastruktur produksi seperti PLN dan PDAM sangat membantu warga misalnya. Adanya listrik dari PLN membuat aktifitas-aktifitas seperti. Usaha kecil misalnya warung, penggilingan padi, dan

usaha jasa lainnya dapat beroperasi dengan lebih baik. Sebelumnya, masyarakat bergantung pada genset dengan biaya bahan bakar yang tinggi. Dengan adanya PLN, juga biaya produksi menurun dan keuntungan meningkat. Keberadaan listrik memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas pada malam hari. Untuk pendidikan Anak-anak dapat belajar dengan nyaman pada malam hari karena adanya penerangan. Selain itu, Dengan PDAM, masyarakat tidak perlu lagi mengambil air dari sungai yang berjarak jauh dan kurang higienis. Air bersih yang disediakan PDAM membantu mencegah penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pencernaan. Hal ini meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya secara umum, keberadaan PLN dan PDAM meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Warga merasa lebih nyaman, kebutuhan dasar terpenuhi, dan aktivitas ekonomi serta sosial berjalan lebih baik”.(3 Juli 2025)

#### **4.2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Pelaksanaan Pemabngunan infrastruktur di wilayah perbatasan tentu tidak lepas dari adanya berbagai faktor di dalamnya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Long Nawang. Terdapat dua jenis faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Perbatasan selalu berkaitan dengan kedua faktor tersebut.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Kay informan dan informan terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat khususnya di Desa Long Nawang, sebagai berikut:

1. Apakah factor pendukung yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kususnya di Desa Long Nawang?

Menurut Bapak Setim Ala, SE, Msi. sebagai Camat Kecamatan Kayan Hulu Bahwa:

“Faktor Pendukungnya terutama menurut beliau adalah masyarakat itu sendiri yang diamana siap membantu dan ikut dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama

terkait pembangunan infrastruktur. Dari kecamat dan desa juga siap untuk membantu dan mengawasi pembangun atau program yang dijalankan hingga terealisasi sepenuhnya”(28 Juni 2025)

Selanjutnya Bapak Lukas Bilung sebagai Kepala Desa Long Nawang, dengan pertanyaan yang sama, mengatakan bawa:

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Adanya program pembangunan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk kawasan perbatasan ( melalui Perpres, Pergub, Perbup). Menurutnya Wilayah perbatasan juga kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti hutan, air, dan lahan yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur seperti PDAM dan energi. Juga adanya Warga desa yang bersedia terlibat dalam proses pembangunan, baik tenaga maupun pemeliharaan hasil pembangunan”.(27 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau, Kepala Adat Desa Long Nawang. Mengatakan, bahwa: “Faktor pendukung menurutnya adalah, dukungan penuh masyarakat terhadap pembangunan, ketersediaan lahan yang cukup luas, perhatian khusus pemerintah pusat dan daerah terhadap wilayah perbatasan, kondisi sosial yang kondusif, serta semangat gotong royong masyarakat”.(25 Juni 2025)

Selanjutnya Bapak Pdt. Surang Bira, Toko Masyarakat Desa Long Nawang. Mengatakan, bahwa:

“Faktor pendukung adalah yang Pertama, posisi strategis Desa Long Nawang sebagai pintu gerbang negara juga menjadikan daerah ini sebagai prioritas pembangunan. Kedua, adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui program strategis nasional serta bantuan anggaran khusus perbatasan, dan terakhir, yaitu potensi sumber daya alam yang melimpah dan antusiasme masyarakat untuk mendukung segala bentuk pembangunan yang masuk ke Desa atau Wilayahnya”. (26 Juni 2025)

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. Sekdes Long Nawang, mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang antara lain adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang memprioritaskan wilayah perbatasan, kemudian

adanya alokasi anggaran dari APBN, APBD, dan Dana Desa. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat mendukung, mereka mau bekerja sama dan bergotong royong. Dan juga letak desa yang strategis di perbatasan menjadi alasan pemerintah memfokuskan pembangunan di sini”.(26 Juni 2025)

Selanjutnya wawan cara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE kaur Perencanaan Desa Long Nawang, mengatakan Bahwa:

“Adanya program pembangunan perbatasan yang dibiayai melalui APBN, APBD, dan Dana Desa menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur seperti PLN, PDAM, dan jalan. Di Desa Long Nawang sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti air untuk pengembangan PDAM dan mikrohidro sebagai pembangkit listrik. antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi, baik melalui tenaga maupun pemeliharaan infrastruktur, menjadi kekuatan dalam mendukung keberhasilan pembangunan.(3 Juli 2025)

2. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Apau Kayan?

Menurut Bapak Setim Ala, SE, Msi. sebagai Camat Kecamatan Kayan Hulu Bahwa:

“Menurutnya faktor yang menghambat secara umum di Wilayah Apau Kayan adalah akses jalan, karena akses ke kota yang ada di Indonesia cukup jauh, ditambah jalan yang tidak memadai/rusak karena badan jalannya masi berupa tanah sehingga pada saat musim hujan kendaraan tidak bisa melintasi jalan yang ada, memang ada akses/alternatif lain seperti udara, tapi disamping harganya yang mahal, barang yang bisa dibawa juga terbatas karena hanya memakai pesawat kecil/perintis. Yang dimana menurut beliau mempengaruhi harga material menjadi lebih tinggi/mahal”.(28 Juni 2025)

Selanjutnya Bapak Lukas Bilung sebagai Kepala Desa Long Nawang, dengan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa:

“Menurutnya faktor penghambat dalam pembangunan terutama Infrastruktur adalah Akses ke wilayah perbatasan yang sulit karena kondisi geografis berbukit dan jauh dari pusat kota. Anggaran yang tersedia juga biasanya terbatas sehingga tidak semua kebutuhan infrastruktur terpenuhi. Disamping itu ada cuaca ekstrem seperti hujan lebat sering menghambat pekerjaan. Selain itu, kurangnya

tenaga ahli, sarana transportasi yang terbatas, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di perbatasan”.(27 Juni 2025)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laheng Ibau, Kepala Adat Desa Long Nawang. Mengatakan, bahwa:

“penghambatnya adalah akses transportasi yang masih sulit terutama saat musim hujan, biaya pembangunan tinggi karena pengiriman material mahal, kekurangan anggaran, kurangnya tenaga ahli di desa, cuaca dan kondisi alam yang cukup ekstrem, serta kendala komunikasi karena jaringan telekomunikasi di sini masih lemah”.(25 Juni 2025)

Selanjutnya Bapak Pdt. Surang Bira, Toko Masyarakat Desa Long Nawang. Mengatakan, bahwa:

“Menurutnya selain akses jalan, kondisi geografis, dan harga barang/material yang tinggi, beliau lebih menyoroti tantang penggunaan anggran yang tidak maksimal, misalnya untuk anggaran Desa yang karena Desa Long Nawang masuk dalam kawasan kuhsus jadi mendapat tambahan anggara cukup tinggi karna sebagai Wilayah Perbatasan, Namun dalam penyerapan/penggunaannya belum bisa maksimal, baik itu karena Sumber Daya Manusia(SDM) nya maupun karena waktu yang diberikan oleh Pemerinta Daerah yang sedikit jadi kegiatan yang sedang dijalankan menjadi terburu-buru. Menurutnya hal ini membuat pembangunan terutama di bidang Infrastruktur yang ada didalam desa jadi tidak maksimal atau tidak berjalan sebagai mana seharusnya. Beliau berharap terutama dari Pemerintah Daerah untuk lebih mamperhatikan hal tersebut, karena menurutnya Desa yang ada diwilayah Perbatasan memiliki kebutuhan atau masalah yang berbeda dengan Desa yang mempunyai akses yang baik ke Kota/Kabupaten, jadi kebijakan atau peraturannya juga harus dibedakan menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah”.(26 Juni 2025)

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Yahuda Jhon S.Pd. Sekdes Long Nawang, mengatakan bahwa:

“Menurutnya yang pertama adalah aksesibilitas yang sulit karena kondisi jalan masih banyak yang rusak, sehingga pengiriman bahan bangunan jadi mahal dan lama. Kedua, biaya pembangunan tinggi karena semua material harus didatangkan dari luar. Ketiga, keterbatasan tenaga ahli dan peralatan. Selain itu, cuaca juga menjadi kendala, apalagi saat musim hujan yang

membuat proyek sering tertunda. Dan terakhir, proses administrasi dan pencairan dana kadang memakan waktu lama”.(26 Juni 2025)

Selanjutnya wawan cara peneliti dengan Bapak Jhoni Laheng, SE kaur Perencanaan Desa Long Nawang, mengatakan Bahwa:

“Pengiriman material yang lama dan memerlukan biaya besar karena akses dari kota ke Apau Kayan secara khusus Desa Long Nawang jika menggunakan darat cukup jauh dan diperparakan dengan jalan yang rusak dan naik turun gunung, bahkan jika ingin menggunakan udara yang ada hanya pesawat perintis tapi muatannya sangat terbatas karena lebih mengutamakan penumpang. Dana desa tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur skala besar, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat cukup tinggi. Curah hujan tinggi sering menyebabkan banjir dan longsor, sehingga menghambat pelaksanaan proyek. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berkompentensi teknis menyebabkan sebagian proyek mengalami keterlambatan”.(3 Juli 2025)

#### **4.3 Pembahasan**

Sebagaimana konsep dari teori model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015:404) Pembahasan dalam analisa ini merupakan bagian dari tahapan analisa interaktif yang telah peneliti sajikan pada bagian analisis data bab 3.

Pada bab atau bagian pembahasan ini, peneliti akan membahas hasil penelitian dilapangan dengan teori dan peraturan yang dijadikan sebagai acuan utama untuk melakukan analisa.

Wilayah perbatasan adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang unik. Infrastruktur di wilayah perbatasan berperan penting sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Infrastruktur yang dibangun meliputi infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, listrik dan air bersih), infrastruktur sosial ( pendidikan,kesehatan), infrastruktur ekonomi (pasar,bank,BUMDes). Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Desa Long Nawang yang menjadi objek penelitian, sudah sesuai dengan amanah peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. Yang

kemudian oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui pemerintahan Kabupaten Malinau untuk menjalankan program tersebut.

Selanjutnya peneliti memaparkan data penelitian berdasarkan hasil lapangan yang peneliti sajikan pada halaman sebelumnya yaitu tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara) Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat peneliti uraikan pembahasannya sebagai berikut:

#### **4.3.1. Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan**

Adalah upaya pemerintah untuk membangun dan meningkatkan berbagai fasilitas fisik di daerah perbatasan negara. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antara daerah perbatasan dan wilayah lain di Indonesia, agar menciptakan keadilan sosial. Sesuai dengan amanah Perpres No. 118 Tahun 2022 Tentang “Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020 – 2024”. Pada Bab 3 pasal Pasal (2) Ayat 1 Tentang “Rencana Induk menjadi pedoman nasional untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelolah batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan” dan Pasal 3 Tentang Renduk BWP-KP 2020-2024 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. isu, visi dan misi;
- b. arah strategis, kebijakan dan strategi pelaksanaan;
- c. wikalayah pengelolaan;
- d. program dan kegiatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui pemerintah kabupaten malinau yang kemudian menjalankan program pembangunan Infrastruktur, Seperti:

#### **4.3.2. Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Jalan dan jembatan**

Infrastruktur perhubungan mencakup sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara yang berfungsi untuk mendukung pergerakan manusia dan barang. Di wilayah perbatasan, infrastruktur perhubungan menjadi kunci utama dalam mendukung konektivitas, pemerataan pembangunan, serta penguatan kedaulatan negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan menemukan Akses jalan darat yang ada di Desa Long Nawang masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan, namun untuk yang ada saat ini, sudah lebih layak dari pada sebelumnya dan sangat memudahkan warga untuk beraktifitas seperti keluar masuk desa atau perjalanan kedesa tetangga. Untuk konektivitas antara wilayah yang jaraknya jauh masih bergantung pada jalur udara. Pembangunan infrastruktur perhubungan di Long Nawang sendiri masih menghadapi tantangan besar, terutama keterbatasan akses darat, dan anggaran. Namun, Pemerintah Pusat dan Daerah sudah menyatakan prioritas dalam pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan bagi Desa Long Nawang. Sesuai dengan amanah Peraturan Presidean (Perpres) Nomor. 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, yang juga didalamnya menekankan tentang Pembangunan Infrastruktur Perhubungan merupakan salah satu prioritas utama guna mendukung integrasi kawasan perbatasan dengan wilayah nasional.

#### **4.3.3. Pembangunan Infrastruktur Perkantoran**

pembangunan infrastruktur perkantoran adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan administrasi. Infrastruktur ini mencakup gedung kantor dan fasilitas pendukungnya seperti listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, serta perabotan kantor. Pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah telah membangun Infrastruktur perkantoran seperti, kantor Desa dan kantor Camat di Desa Long Nawang. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Long Nawang, hal ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan

masyarakat akan administrasi, seperti pembuatan KTP, KK, atau dokumen yang sebelumnya harus dibuat di Ibu Kota Kabupaten. Sesuai dengan amanah Perpres Nomor.118 Tahun 2022, Tentang “Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024”, Pasal (3) Ayat (1) a, c dan d yang menekankan Penguatan Kelembagaan, Pelayanan Publik, dan Konektifitas.

#### **4.3.4. Infrastruktur Sosial**

Infrastruktur Sosial pada dasarnya merupakan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kegiatan sosial seperti Pendidikan dan Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pembangunan Infrastruktur sosial seperti Sekolah dan Puskesmas di Desa Long Nawang sendiri sudah cukup baik dimana memiliki fasilitas gedung pendidikan seperti PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan dari segi Kesehatan suda ada gedung Puskesmas yang suda memiliki sarana seperti Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Bersalin, Gudang Obat, Ruang Rawat Inap. Meskipun, pelayanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya optimal. Seperti gedung sekolah yang belum memiliki ruang kelas yang cukup, perpustakaan, dan dari segi tenaga pengajar dan administrasi. Serupa dengan sekola, Puskesmas yang ada di Desa Long Nawang memiliki gedung yang belum cukup luas untuk menampung dan membuat penambahan ruang rawat inap, Laboratorium juga masih kekurangan tenaga media (dokter, bidan dan perawat). Sesuai dengan amanah Perpres Nomor.118 Tahun 2022 Tentang, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. Yang dimana Pemerintah Pusat dan Daerah sudah berusaha dan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan. Terutama untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di perbatasan Negara.

#### **4.3.5. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi**

Infrastruktur ekonomi merupakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, meliputi pasar, lembaga keuangan, jalan, dan sarana transportasi. Menurut Todaro (2012), keberadaan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Long Nawang, Infrastruktur Ekonomi seperti Pasar dan Bank telah tersedia melalui kerjasama Pemerintah pusat dan Daerah. Bank sendiri di bangun oleh pemerintah yang bekerjasama dengan bank Nasional untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi dan kegiatan perbankan. Sedangkan untuk Pembangunan Pasar adalah hasil swadaya masyarakat yang dibantu oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan agar bisa melakukan aktifitas jual beli dengan lebih baik. Untuk pelayanannya Bank sudah berusaha memberi yang terbaik tapi masih terkendala bangunan gedung yang masih kecil dan sarana prasaran belum memadai. Pasar di Desa Long Nawang belum sepenuhnya efektif dalam membantu perekonomian warga, karena waktu buka hanya satu minggu sekali pada hari kamis dan hari perayaan besar. Oleh karena itu, keberadaan pasar permanen dan akses layanan perbankan harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan perbatasan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 Pasal (8) tentang “mengarahkan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup pasar permanen, layanan perbankan, dan infrastruktur produksi”.

#### **4.3.6. Pembangunan Infrastruktur Produksi**

Menurut Tarigan (2009), infrastruktur produksi adalah sarana fisik yang berfungsi untuk mendukung proses produksi di sektor ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan. Infrastruktur ini meningkatkan efisiensi produksi, memperlancar distribusi, dan menurunkan biaya logistik.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Long Nawang menemukan ada 2 Infrastruktur yang termasuk dalam Infrastruktur Produksi seperti Listrik (PLN) dan Air Bersih (PDAM) yang telah dibangun dan digunakan. Walaupun masih terbatas tetapi sudah dirasa cukup puas dari pada masih menggunakan mesin diesel yang dimana aliran listriknya tidak stabil dan sering merusak alat-alat elektronik atau yang menggunakan listrik. Sedangkan PDAM untuk air bersih sudah tersambung setidaknya untuk sebagian rumah

tangga, yang walaupun pada penggunaannya masih sering tidak mengalir terutama pada saat musim kemarau karena untuk dam air penampung yang dibangun masih kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah banyak. Sesuai dengan amanah Perpres No. 118 Tahun 2022 Pasal (8) tentang "mengarahkan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup pasar permanen, layanan perbankan, dan infrastruktur produksi". Artinya, pembangunan infrastruktur produksi di Long Nawang sudah sesuai dengan kebijakan nasional, dalam Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan. Hanya perlu adanya peningkatan dan pemeliharaan terutama pada kapasitas Air bersih yang bisa ditampung dan pemeliharaan kualitas airnya.

#### **4.3.7. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata faktor diartikan sebagai keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Faktor dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Istilah tersebut adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan. Faktor pendukung merupakan semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, menunjang, membantu, dan mempercepat terjadinya sesuatu. Sedangkan faktor penghambat ialah semua jenis faktor yang sifatnya dapat mempengaruhi atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

##### **4.3.7.1. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, dapat dikatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara) yaitu ada beberapa faktor, seperti :

- a. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan dan desa yang

saling berkoordinasi tentang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat perbatasan.

- b. Peraturan dari Presiden (Perpres) Nomor. 118 Tahun 2022 yang memprioritaskan perbatasan sehingga pembangun bisa sampai ke pelosok desa.
- c. Sumber Daya Alam (SDA yang masi banyak dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan seperti untuk PLTS atau PLTA untuk listrik, pasir batu dan kayu untuk bangunan gedung dan masih banyak SDA lain yang bisa menjadi pendukung dalam pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang.
- d. Masyarakat yang selalu siap untuk membantu apa bila di perlukan.

#### **4.3.7.2. Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Long Nawang bahwa yang menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara) yaitu ada beberapa poin seperti :

- a. Akses jalan yang belum sepenuhnya terbuka dan sulit terjangkau sehingga menyebabkan tingginya harga barang dan jasa serta kebutuhan pokok lainnya.
- b. Anggaran yang tidak mencukupi.
- c. SDM pada bidang tertentu masih kurang.
- d. Pengawasan baik dari pemerintah pusat dan daerah masih kurang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan secara umum mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi di Desa Long Nawang kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara). Dilihat dari aspek Perhubungan (Akses jala dan jembatan), Perkantoran, Ekonomi, Pelayanan Sosial, dan Produksi, Yang telah di bangun memberikan dampak yang cukup positif dalam menunjang kegiatan dan kehidupan masyarakat Desa Long Nawang. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Long Nawang yang menjadi salah satu wilayah perbatasan antar Indonesia dan Malaysia, sudah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Reduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 Pasal (3) Ayat 1 (b) Tentang “ arah strategis, kebijakan dan strategi pelaksanaan” dan 1(d) Tentang “program dan kegiatan”. Untuk mendukung kesimpulan tersebut peneliti mengemukakan dalam bentuk fokus penelitian, sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan (Jalan dan Jembatan)**

Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur perhubungan di Desa Long Nawang telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam peningkatan aksesibilitas dan pelayanan dasar masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan difokuskan pada pembukaan akses jalan ke daerah terpencil dan perbatasan, meskipun masih banyak ruas jalan yang rusak atau belum tersambung secara permanen.

#### **2. Pembangunan Infrastruktur Perkantoran**

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkantoran di Desa Long Nawang, terutama yang berkaitan dengan Pelayanan Publik, menunjukkan kemajuan dalam

mendukung fungsi pemerintahan, seperti adanya perbaikan dan pembangunan kantor Kecamatan dan kantor Desa. kehadiran negara di wilayah perbatasan juga menjadi pemacu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dalam hal ini ditandai dengan adanya pembangunan dan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, serta fasilitas kantor desa dan pelayanan administratif lainnya, yang kini memiliki akses lebih mudah ke layanan pemerintahan tanpa harus ke kota atau kabupaten. Pembangunan Infrastruktur Perkantoran yang telah dilaksanakan juga memberi dampak pada pelayanan dasar seperti pembuatan dokumen kependudukan, surat lintas batas, dan konsultasi sosial menjadi lebih terjangkau dan cepat.

### 3. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Sosial

Pelaksanaan pembangunan sekolah dan puskesmas memberikan dampak positif, di mana dengan dibangunnya gedung sekolah mulai dari Paud/TK, SD, SMP dan SMA kebutuhan akan pendidikan terutama sejak usia dini dapat terpenuhi, meskipun masih terdapat kekurangan dari segi sarana dan prasarana seperti tenaga didik (guru), perpustakaan, dan tenaga administrasi (operator). Pelaksanaan pembangunan puskesmas telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan dasar dan pencegahan penyakit. Akan tetapi, masih kurang tenaga medis, fasilitas kesehatan, laboratorium dan bangunan yang masih belum cukup luas untuk menampung kebutuhan alat pendukung medis dan masyarakat dalam jumlah besar.

Pembangunan infrastruktur sosial memang sudah dijalankan dan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan di Wilayah Perbatasan, yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, baik ekonomi maupun sosial, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Secara umum, pembangunan infrastruktur sosial di Desa Long Nawang berjalan baik dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

#### 4. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Di Desa Long Nawang sendiri, Infrastruktur Ekonomi seperti Pasar dan Bank telah di bangun melalui kerjasama Pemerintah pusat dan Daerah. Bank dibangun oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak bank Nasional dan Daerah untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi dan pelayanannya Bank sudah dirasa cukup baik tapi masi terkendala karna akses bangunan yang masi kecil dan sarana prasarana yang belum memadai. Pasar di Desa Long Nawang masih berupa bangunan sementara yang dibangun oleh pemerintah desa dan masyarakat yang dimana belum sepenuhnya efektif dalam membantu perekonomian warga, salah satu penyebabnya karena pasar hanya buka satu kali dalam seminggu pada hari kamis dan pada saat ada acara-acara besar. Dengan dibangunnya pasar dan bang sudah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (Prerpres) Nomor. 118 Tahun 2022 Pasal (8) Tentang “mengarahkan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup pasar permanen, layanan perbankan, dan infrastruktur produksi”. Walaupun belum bisa terealisasi sepenuhnya, karena hanya bisa dilakukan secara bertahap.

#### 5. Pembangunan infrastruktur Produksi

Di Desa Long Nawang sendiri Infrastruktur Produksi seperti Listrik dan Air Bersih telah disediakan oleh pemerintah daerah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Prusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Karena masi dalam tahap pengembangan dan sarana dan prasarananya masi banyak yang kurang atau belum ada. Tetapi hal ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk dapat segera di tingkatkan layanan dan penguanaannya. Agar sejalan dengan amanah Perpres No. 118 Tahun 2022 Pasal (8) yang Tentang "mengarahkan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup pasar permanen, layanan perbankan, dan infrastruktur produksi". Artinya, pembangunan infrastruktur produksi di Long Nawang sejalan dengan kebijakan nasional, dan termasuk dalam Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan.

## 5.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara) peneliti memberi saran agar :

1. Infrastruktur perhubungan

Disaran kan untuk pemerintah daerah terutama Kabupaten Malinau agar adanya perbaikan jalan dan jembatan yang masih terputus dan peningkatan pada jalan dan dan jembatan yang sudah ada agar menjadi prioritas dalam pembangunan.

2. Infrastruktur Perkantoran

Sebaiknya ada peningkatan bangunan perkantoran seperti luas bangunan, pembangunan dan perbaikan jalan yang menuju kekantor yang ada dan perbaikan pada bangunan yang sudah lama serta memberikan pelatihan untuk SDM di kantor desa. pengadaan fasilitas yang mendukung pelayanan dan pekerjaan juga dirasa cukup penting agar pelayanan lebih cepat dan efektif.

3. Infrastruktur Sosial (Sekolah dan Puskesmas)

Disaran kan agar pemerintah pusat dan daerah memberikan prioritas untuk penambahan bengunan, ruang kelas dan perpustakaan dan untuk mendukung berjalanya pendidikan sebaiknya ada penambahan tenaga didik (guru) pada mata pelajaran tertentu dan fasilitas pendukung pendidikan. Sedangkan puskesmas sebaiknya pemerintah memperluas bangunan gedung dan penambahan bangunan seperti laboratorium, gudang obata, dan ruang rawat inap dan agar pelayanan kesehatan berjalan lebih baik jumlah alat medis, tenaga medis dan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan juga wajib di prioritaskan.

4. Infrastruktur Ekonomi

Sebaiknya dilakukan Perbaikan bangunan dan Fasilitas yang dibutuhkan pasar dan pemerintah sebaiknya memanfaatkan bangunan pasar untuk kegiatan jual beli masyarakat sedangkan Bank dari segi gedung sebaiknya ditingkatkan

karena masih belum cukup untuk menampung jumlah nasabah yang terus meningkat dan untuk segi lain lebih baik adanya penambahan fasilitas baik itu bangunan, pelayanan, dan jumlah tenaga kerja.

#### 5. Infrastruktur Produksi

Di sarankan agar adanya penigatkan bangunan terutama pada kapasitas jumlah air yang bisa ditampung, obat untuk bakteri atau kuman, jumlah pipa dan pemeliharaan bangunan. PLN sebaiknya ada penambahan dan perawatan bangunan dari pemerintah, dan agar menyala 24 jam adanya penambahan jumlah minyak dan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal :**

- Firdaus. (2018). Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3 (2), 109 – 122. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Fetrushio, F. T. M., & Suprojo, A. (2019). *Analisis Pengaruh Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perbatasan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2). Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. ISSN 2442-6962.
- Isan Daud. (2016). *Kajian Tentang Pembangunan Infrastruktur di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Malinau. eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 55–70. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. <http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id>
- Oktoriani. (2015). *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru)*. Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

### **Buku :**

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2011). *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011–2025*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Badan Pembangunan Nasional. (2019). *Indikator Sosial Ekonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pembangunan Nasional.
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irwan Lahnisafitra. (2015). *Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat–Serawak*. Bandung.
- Kecamatan Kayan Hulu. (2023). *Kecamatan Kayan Hulu Dalam Angka 2023*. Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
- Khairul Muluk. (2012). *Membangun Manajemen Daerah Perbatasan yang Efektif. Innovative Governance*. Seminar IAPA, 12–14 Juni 2012.
- Lutfi Muta'ali, dkk. (2012). *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE), Universitas Gadjah Mada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. ke-26). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muharto, & Arisandy. (2016). *Pedoman Wawancara Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Puspa, A. W. (2019). Tiga Pos Lintas Batas Negara Dibangun di Kaltara. *Bisnis com*, 23 Desember 2019. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20191223/407/1183983/tiga-pos-lintas-batas-negara-dibangun-di-kaltara>

\_\_\_\_\_. Santrock, J. W. (2007). *Sosial Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **Dokumen :**

Perpres Nomor. 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

Pasal 4 & Lampiran Perpres Nomor. 118 Tahun 2022 tentang menyebut bahwa pemerintah daerah wajib menyesuaikan perencanaan sesuai rencana induk

Tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Kaltara No. 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2026 mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistematisa; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup

Perbub No 47 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja badan pengelola perbatasan daerah

Profil Desa Long Nawang (2023)

## **Pedoman Wawancara**

### **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERBATASAN NEGARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH APAU KAYAN**

#### **1. Petunjuk**

Dalam upaya meningkatkan rasa keadilan dan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Apau Kayan, harusnya menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat dalam menyusun berbagai kebijakan yang di tetapkan dalam bentuk perencanaan pembangunan terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang di butuhkan masyarakat di wilayah perbatasan, yang kemudian dilaksanakan, meliputi :

1. Pembangunan Infrastruktur Perhubungan ( jalan, jembatan)
2. Pembangunan infrastruktur perkantoran
3. Pembangunan infrastruktur Sosial ( sekolah, puskesmas, dll)
4. Pembangunan infrastruktur Ekonomi ( pasar, bank,dll)
5. Pembangunan infrastruktur Produksi ( irigasi, dll)

#### **2. Pertanyaan :**

##### **2.1. Pembangunan Infrastruktur Perhubungan (jalan, jembatan)**

- a. Menurut pendapat Bapak/ ibu/ saudara apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/ menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah perbatasan?
- b. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, apakah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan?
- c. Menurut bapak/ibu/saudara, apa saja dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas pembangunan infrastruktur jala, jambatan?

##### **2.2. Pebangunan Infrastruktur Kantor (pelayanan publik)**

- a. Menurut pendapat Bapak/ ibu/ saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik seperti perkantoran diwilayah perbatasan?
- b. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, Apakah pembangunan infrastruktur perkantoran yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan?

- c. Menurut bapak/ibu/saudara, Apa saja dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas pembangunan infrastruktur kantor (pelayanan publik)?

### 2.3. Pembangunan Infrastruktur Sosial (sekolah, puskesmas)

- a. Menurut pendapat Bapak/ ibu/ saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur Sosial seperti Sekolah dan Puskesmas diwilayah perbatasan?
- b. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, Apakah pembangunan infrastruktur Sosial seperti Sekolah dan Puskesmas yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan?
- c. Menurut bapak/ibu/saudara, Apa saja dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas pembangunan infrastruktur sosial (Sekolah dan Puskesmas)?

### 2.4. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi (Pasar, Bank)

- a. Menurut pendapat Bapak/ ibu/ saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar dan Bank diwilayah perbatasan?
- b. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, Apakah pembangunan infrastruktur Pasar dan Bank yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan?
- c. Menurut bapak/ibu/saudara, Apa saja dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas pembangunan infrastruktur Ekonomi (Pasar dan Bank)?

### 2.5. Pembangunan Infrastruktur Produksi (Irigasi)

- a. Menurut pendapat Bapak/ ibu/ saudara, Apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat/menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur Produksi (Irigasi) diwilayah perbatasan?
- d. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, Apakah pembangunan infrastruktur Produksi (irigasi) yang dilaksanakan memadai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan?
- e. Menurut bapak/ibu/saudara, apa saja dampak yang dirasakan masyarakat perbatasan atas pembangunan infrastruktur Produksi (Irigasi)?

# ***LAMPIRAN***

## LAMPIRAN



**UNIVERSITAS  
WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT ( LPPM )**

Dink.  
+ BPD Katin  
+ Bukopin  
+ Muamalat  
+ Mandiri

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MENGIKUTI KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN 2020  
Nomor : 026 /LPPM-UWGM/KKN-TI/VIII/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Dedi Rahman Nur, S. Pd.,M. Pd.  
NIK : 2014.084.164  
Jabatan : Kepala LPPM UWGM Samarinda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anye Kristofer  
NPM : 1863201048  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bahwa benar mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Teras Nawang, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tahun selama 1 bulan, per tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 7 Agustus 2025

**Dr. Dedi Rahman Nur, S. Pd., M. Pd.**  
NIK. 2014.084.164

Telp : (0541) 4121117  
Fax : (0541) 736572  
Email : uwigama@uwgm.ac.id  
Website : uwgm.ac.id

*Kampus unggul, widyakewirausahaan, gemilang, dan mulia.*

Kampus Biru UWGM  
Rektorat - Gedung B  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08  
Samarinda 75119



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
UPT. PERPUSTAKAAN**

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAMAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : 596/BP/UWGM-Perpust./VI/2020

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i):

N A M A : Anye Ckristofer  
N P M : 1863201048  
FAKULTAS : Fakultas Ilmu Sosial & Politik  
PROGRAM STUDI : Administrasi Negara

Yang bersangkutan pada saat ini tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan. Surat keterangan ini diberikan untuk melengkapi **Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Semester** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 19 Juni 2020  
Kepala UPT Perpustakaan,

  
**Khami Bhuwana, S.KM., M.KI.**

Telp : (0541) 744237 – 745167  
Fax : (0541) 736572  
Email : uwigama@uwgm.ac.id  
Website : uwigama.ac.id

**Bersama Kita Biga!  
Menggapai Cita**

Kampus Biru UWGM  
Rektorat – Gedung B  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08  
Samarinda 75119



**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI BAIK**

SIK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0396/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/IAK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 17 Juni 2025

Nomor : 255/UWGM-FISIP/AK/VI/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu  
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anye Ckristofer  
N P M : 1863201048  
Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Kantor Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

**"Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Apau Kayan (Studi di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)"**

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.

  
Dr. H. Abdul Rofik, SP, MP  
NIP. 2023.070.326

Telp : (0541)4121117  
Fax : (0541)736572  
Email : uwgama@uwgm.ac.id  
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi  
Kampus Berjuta Prestasi**

Kampus Biru UWGM  
Rektorat - Gedung B  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08  
Samarinda 75119



**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI B**

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anye Ckristofer  
NPM : 1863201048  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 Drs. M. Kasim M., M.Si  
2 Trisna Waty Riza Eryani, S. Sos., M.si  
Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara dalam meningkatkan Kesejahteraan  
Masyarakat di Wilayah Apau Kayan (studi di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau  
Provinsi Kalimantan Utara)

Dosen Pembimbing ( I / II )

Drs. M. Kasim M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	19/10-2024	- Perbaikan Judul - Fokus Penelitian		
2	2/11-2024	Ruba Fokus Penelitian		
3	9/11-2024	Ruban latar belakang masalah		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	23/ 12-2024	Kerangka Fikir		
5	20/ 1-2025	Perbaiki Bab II Teori Penelitian		
6	28/ 1-2025	metode Penulisan		
7	7/ 2-2025	Tambah uu Dikerangka Pikir		
8	16/ 2-2025	Ganti Fokus Penelitian		
9	29/ 2-2025	Pedoman wawancara		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
10	5/3-2025	Tambah Teori Pembangunan		
11	3-2025	Ganti Pedoman wawancara		
12	18/3-2025	Perbaiki Pedoman wawancara		
13	2/6-2025	Perbaiki Definisi konseptuan dan Pedoman wawancara		
14	17/6-25	Sehupin penelitian lapangan		
15	9/8-25	Sehupin sumber		
16	20/8-25	Sehupin Pustaka		
17	28/8-25	Sehupin jilid	 (Hal )	



**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI B**

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ANYE KRISTOFER  
NPM : 1863 201048  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 Drs. M. Kasim M. M.Si .....  
2 Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :


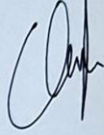
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan  
Negara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  
di wilayah Arau Karan (Studi di longkawang Kecamatan Kayan Hulu  
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

Dosen Pembimbing (I/II)

Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	10/11-2021	- Daftar belakas - teori + Fokus - Sumber Data		
		- Daftar pustaka		
	18/11-2021	- perbaiki kerangk fikir - Daftar isi - Pedoman wawancara		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	13/12-2024	Acc Penelitian		
	28/7-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Margin</li> <li>- Perbaiki latar belakang</li> <li>- .. Pomyan</li> <li>- .. Kerangka pikir</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 118 th-2024</li> <li>- Tabel 5.1 dan 1 spri, dan tabel</li> <li>- Penulisan hasil wawancara</li> <li>- Pembahasan</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesimpulan dan</li> <li>- Daftar pustaka.</li> </ul>		
	11/8-2025	ACC semesta		
	18/8-2025	Acc penulisan		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	28/8-2025	Acc dilir		



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA



DAFTAR PERBAIKAN

(SEMINAR HASIL)

Nama : Anye Ckristofer  
NPM : 1863201048  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di  
Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten  
Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)  
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025

No.	Nama Dosen	Saran Perbaikan	Keterangan	Paraf
1.	Drs. M Kasim., M.Si	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penempatan kata, dasar hukum pada akhir redaksi</li><li>- Kesimpulan Umum</li><li>- Saran</li></ul>	Sudah di Perbaiki	
2.	Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar isi</li><li>- Semua Tabel di buat 1 Spasi</li><li>- Tabel penduduk berdasarkan pendidikan di perbaiki</li><li>- Hasil pembahasan</li><li>- Daftar pustaka jurnal, buku dan dokumen jagan digabung</li><li>- Teknik penulisan di perbaiki</li></ul>	Sudah Di Perbaiki	28/8-2025 
3.	Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	<ul style="list-style-type: none"><li>- Margine</li><li>- Daftar pustaka</li><li>- Pendapat ahli di bab I di cek lagi</li><li>- Bab II di cek lagi</li><li>- Spasi di perhatikan</li></ul>	Sudah Di Perbaiki	



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA



DAFTAR PERBAIKAN  
(PENDADARAN)

Nama : Anye Kristofer  
NPM : 1863201048  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di  
Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten  
Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)  
Hari, Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

No.	Nama Dosen	Saran Perbaikan	Keterangan	Paraf
1.	Drs. M Kasim., M.Si		Sudah di Perbaiki	
2.	Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cover</li><li>- Kata kunci di ringkasan</li><li>- Daftar isi dan Daftar</li><li>- Tabel perbaikan</li><li>- Teknik penulisan/ kutipan di perbaikan</li><li>- Nomor halaman tidak ada di daftar pustaka</li></ul>	Sudah Di Perbaiki	28/8-2025 
3.	Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sesuaikan dengan pedoman penulisan</li><li>- Perhatikan garis bawah dalam teori di hilangkan</li></ul>	Sudah Di Perbaiki	



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

LEMBAR PERSETUJUAN JILID SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anye Ckristofer  
NPM : 1863201048  
Program Studi : Administrasi Publik  
Ketua Penguji Skripsi : Drs. M Kasim., M.Si  
Sekretaris Penguji Skripsi : Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si  
Anggota Penguji Skripsi : Ahmad Yani., S.Sos., M.Si  
Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara)

NO.	DAFTAR PERBAIKAN	LENGKAP *	
		IYA	TIDAK
1	SEMINAR PROPOSAL		
2	SEMINAR HASIL		28 AUG 2025
3	UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI/PENDADARAN		28 AUG 2025

\*Diisi oleh Fakultas

Syarat Standar Jilid Melampirkan:

1. Daftar Perbaikan **Seminar Proposal** yang telah ditanda tangani Tim Dosen Penguji;
2. Daftar Perbaikan **Seminar Hasil** yang telah ditanda tangani Tim Dosen Penguji;
3. Daftar Perbaikan **Ujian Komprehensif Skripsi/Pendadaran** yang telah ditanda tangani oleh Dosen Penguji, serta keterangan persetujuan jilid skripsi oleh masing-masing Tim Dosen Penguji dilembar daftar perbaikan

Keterangan:

1. Cover Skripsi Menggunakan Logo Universitas. (Dapat diunduh di [fisipol.uwgm.ac.id](http://fisipol.uwgm.ac.id))
2. Pembatas halaman skripsi kertas HVS A4 berwarna jingga (**orange/orange**)
3. Isi skripsi menggunakan kertas HVS A4 80 GSM berwarna putih.
4. Jumlah Skripsi **wajib** 3 (tiga) rangkap, untuk:
  - a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  - b. Perpustakaan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
  - c. Arsip
5. Skripsi **WAJIB** cetak asli (**print**) bukan fotokopi
6. Menyertakan **Burning CD-ROM file** Skripsi dengan berisikan format *Ms.Word* dan *PDF*, sebanyak **2 (dua) buah CD**.
7. Menyertakan Judul Skripsi, Nama, NPM, dan Tahun Lulus pada *CD-ROM*.

Telp : (0541)4121117  
Fax : (0541) 736572  
Email : uwigama@uwgm.ac.id  
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi  
Kampus Berjuta Prestasi!

Kampus Biru UWGM  
Rektorat – Gedung B  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08  
Samarinda 75119



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA  
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial, dipandang perlu menyusun rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. bahwa dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024;

Mengingat . . .

SK No 141443 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut Renaksi Pengelolaan BWN-KP adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
3. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 2

- (1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan pedoman nasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (2) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

- (1) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. isu, visi dan misi;
  - b. arah strategis, kebijakan dan strategi pelaksanaan;
  - c. wilayah pengelolaan;
  - d. program dan kegiatan; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pengelolaan BWN-KP tahun 2020 dan tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 digunakan sebagai pedoman:

- a. penyusunan atau penyesuaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan kementerian/lembaga dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan pada kurun waktu tahun 2020-2024;
- b. penyusunan atau penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan pada kurun waktu tahun 2020-2024;
- c. koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi pelaksanaan rencana lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, indikator, pendanaan, dan pelaksana; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 5 . . .

**Gambar 1.** Wawancara Camat Kayan Hulu



Sumber: Di olah oleh peneliti (Wawancara 26 Juni 2025)

**Gambar 2.** Wawancara Kades Desa Long Nawang



Sumber: Diolah oleh peneliti, 28 Juni 2025

**Gambar 3.** Wawancara dengan kepala Adat Long Nawang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 27 Juni 2025

**Gambar 4.** Wawancara Tokoh Masyarakat



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 26 Juni 2025

**Gambar 5. Wawancara Sekdes Long Nawang**



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 26 Juni 2025

**Gambar 6. Wawancara Kaur Perencanaan Long Nawang**



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 3 Juli 2025

**Gambar 7.** Jalan Menuju Desa Long Nawang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 11 Juli 2025

**Gambar 8.** Jembatan Desa Long Nawang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 11 Juli 2025

**Gambar 9. Suasana Kantor Camat Kayan Hulu**



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 11 Juli 2025

**Gambar 10. Kantor Desa Long Nawang**



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 14 Juli 2025

**Gambar 11.** SMP N. 1 Kayan Hulu lokasi Desa Long Nawang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 14 Juli 2025

**Gambar 12.** SMAN 2 Malinau lokasi di Desa Long Nawang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 14 Juli 2025

**Gambar 13.** UPTD Puskesmas Long Nawang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 14 Juli 2025

**Gambar 14.** Bersama Perawat dan Bidan Puskesmas Long Nawang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 14 Juli 2025

**Gambar 15.** PLN di Desa Long Nawang



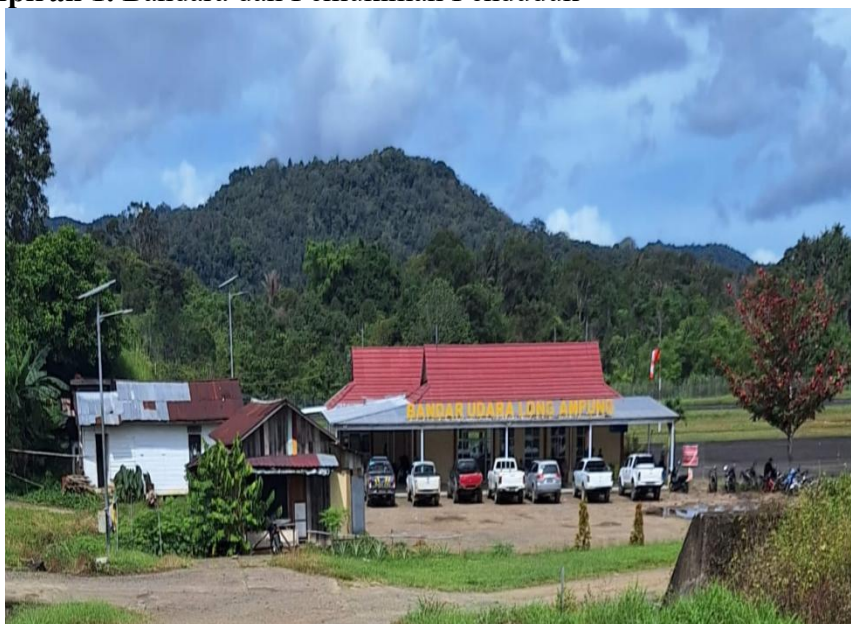
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 14 Juli 2025

**Gambar 16.** PDAM yang dipakai 2 Desa Long Nawang dan Nawang Baru



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 15 Juli 2025

**Lampiran 1. Bandara dan Pemukiman Penduduk**



Sumbar: Oleh Peneliti, 16 Juli 2025

## Lampiran 2. Persimpangan Menuju PLBN dan Long Nawang



Sumber: Oleh peneliti, 17 Juni 2025